



TESIS - TE185401

**ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN DESA
BERKINERJA TERBAIK MENGGUNAKAN FUZZY
TOPSIS
(Studi Kasus pada 198 Desa di Kabupaten
Madiun)**

WRIDHASARI HAYUNINGTYAS
6022201019

DOSEN PEMBIMBING
Prof. Dr. Ir. Mauridhi Hery Purnomo, M.Eng.
Dr. Adhi Dharma Wibawa, S.T., M.T.

PROGRAM MAGISTER
BIDANG KEAHLIAN TELEMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO DAN INFORMATIKA CERDAS
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
2022



TESIS - TE185401

**ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN DESA
BERKINERJA TERBAIK MENGGUNAKAN FUZZY
TOPSIS
(Studi Kasus pada 198 Desa di Kabupaten
Madiun)**

WRIDHASARI HAYUNINGTYAS
6022201019

DOSEN PEMBIMBING
Prof. Dr. Ir. Mauridhi Hery Purnomo, M.Eng.
Dr. Adhi Dharma Wibawa, S.T., M.T.

PROGRAM MAGISTER
BIDANG KEAHLIAN TELEMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO DAN INFORMATIKA CERDAS
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
2022

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar

Magister Teknik (MT)

di

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh

WRIDHASARI HAYUNINGTYAS

NRP: 6022201019

Tanggal Ujian: 06 Januari 2022

Periode Wisuda: Maret 2022

Disetujui oleh

Pembimbing:

1. Prof.Dr.Ir. Mauridhi Hery P., M.Eng.
NIP: 195809161986011001



2. Dr. Adhi Dharma Wibawa, S.T., M.T.
NIP: 197605052008121003



Penguji:

1. Dr.Ir. Wirawan, DEA.
NIP: 196311091989031011



2. Eko Setijadi, ST.,MT.,Ph.D.
NIP: 197210012003121002



3. Dr. Diah Puspito Wulandari, S.T., M.Sc.
NIP: 198012192005012001



Kepala Departemen Teknik Elektro
Dedet Candra Riawan, S.T., M.Eng., Ph.D.

NIP: 197311192000031001

Halaman ini sengaja dikosongkan

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi keseluruhan Tesis saya dengan judul **“ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN DESA BERKINERJA TERBAIK MENGGUNAKAN FUZZY TOPSIS (Studi Kasus pada 198 Desa di Kabupaten Madiun)”** adalah benar-benar hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan merupakan karya pihak lain yang saya akui sebagai karya sendiri.

Semua referensi yang dikutip maupun dirujuk telah ditulis secara lengkap pada daftar pustaka. Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Surabaya, 17 Januari 2022

Wridhasari Hayningtyas
NRP. 6022201019

Halaman ini sengaja dikosongkan

ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN DESA BERKINERJA TERBAIK MENGGUNAKAN FUZZY TOPSIS (Studi Kasus pada 198 Desa di Kabupaten Madiun)

Nama mahasiswa : Wridhasari Hayuningtyas
NRP : 6022201019
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Ir. Mauridhi Hery Purnomo, M.Eng.
2. Dr. Adhi Dharma Wibawa, S.T., M.T.

ABSTRAK

Di saat dunia dalam kondisi normal baru dengan perubahan yang sangat cepat, penuh ketidakpastian, tingkat kompleksitas yang tinggi dan banyak hal menjadi ambigu, maka keyakinan untuk menentukan rencana strategis menjadi semakin sulit dan beradaptasi dengan perubahan menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh organisasi. Banyaknya informasi yang tidak terorganisir dapat berdampak pada sudut pandang yang tidak sempurna terhadap fakta dan pengambilan keputusan secara parsial di dalam organisasi. Kecerdasan bisnis menjadi sebuah konsep penting untuk mengolah data dan informasi yang tidak terstruktur menjadi sebuah rencana strategis yang lebih konkret dan memungkinkan organisasi untuk memiliki keputusan yang kompetitif dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas bisnis.

Pemerintah Desa merupakan organisasi terkecil di sistem pemerintahan Indonesia, karena desa merupakan unit terkecil di dalam pemerintahan untuk mengimplementasikan regulasi dan program - program pembangunan di seluruh area pemerintahan nasional. Pemerintah Desa melaksanakan serangkaian pekerjaan setiap tahun dari pemerintah pusat, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaksanaan dan pelaporan. Namun, peran penting Pemerintah Desa di dalam pembangunan negara juga membawa beberapa kekurangan, seperti korupsi dan efek domino lainnya yang muncul pada Pemerintah Desa.

Beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut telah diidentifikasi, seperti kurangnya kapabilitas dalam mengelola pemerintahan desa dan kualitas sumber daya manusia. Pemantauan dan evaluasi kinerja Pemerintah Desa telah dilaksanakan setiap tahun secara rutin. Namun, pedoman evaluasi kinerja Pemerintah Desa yang terukur sampai sekarang belum ditentukan secara nasional.

Penelitian ini ditujukan untuk membuat sebuah pedoman penilaian kinerja Pemerintah Desa secara komprehensif melalui pendekatan kerangka kerja tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance Framework*). Penelitian ini melibatkan 198 desa di Kabupaten Madiun sebagai studi kasus. Tujuh puluh empat parameter diusulkan untuk mengevaluasi pemetaan hasil kinerja Pemerintah Desa dan diolah menggunakan metode Fuzzy TOPSIS. Fuzzy TOPSIS digunakan untuk meranking 198 desa menjadi 4 kelompok hasil kinerja Pemerintah Desa. Hasil klasifikasi Fuzzy TOPSIS telah divalidasi menggunakan skor manual dan

didapatkan tingkat akurasi sebesar 86,4%. Hal ini berarti 74 parameter yang diusulkan dapat digunakan untuk meranking dan memetakan kinerja Pemerintah Desa secara nasional dengan beberapa penyesuaian.

Kata kunci: Pengambilan Keputusan, Pengukuran Kinerja, Pemerintah Desa, Fuzzy TOPSIS

DECISION MAKING ANALYSIS OF THE BEST VILLAGE PERFORMANCE USING FUZZY TOPSIS (Case Study on 198 Villages in Madiun Regency)

By : Wridhasari Hayuningtyas
Student Identity Number : 6022201019
Supervisor(s) : 1. Prof. Dr. Ir. Mauridhi Hery Purnomo, M.Eng.
2. Dr. Adhi Dharma Wibawa, S.T., M.T.

ABSTRACT

In a world where volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity (VUCA) has become the new normal, the faith to determine a definite strategic plan become more difficult and adapting to changes become a major challenge faced by organizations. A huge unorganized information could impact to an imperfect view of the facts and a partial decision-making process in organization. Business Intelligence conception is then becoming essential view for converting unstructured data and information into a more actionable strategic plans that allows organizations to make competitive decisions and improve business efficiency and productivity.

Village Government is the smallest organization in Indonesian government system, because villages are the smallest unit in the government for implementing regulation and development programs in all areas of national government. The village government executes a series of tasks every year from the central government starting from planning, budgeting, administrating, executing and reporting. However, those important role of Village Government in the development of a country brings also some drawbacks such as corruption and other following domino effects on the Village Government its self.

Several factors have been identified that cause those problems such as lack of capabilities in managing village organization and human resources quality. Monitoring and evaluation regarding those Village Government performances, normally has been done each year. However, measurable evaluation standard for Village Government performance until recently has not been determined nationally.

This study is intended to make a comprehensive standard of village government performance assessment through a Good Governance Framework approach. This study involved 198 villages from Madiun Regency as a case study. Seventy-four measured parameters were proposed to evaluate Village Government performance mapping using Fuzzy TOPSIS method. Fuzzy TOPSIS is implemented to rank those 198 villages into 4 group of Village Government performance level. The fuzzy TOPSIS classification result has been validated by using manual scoring, and showing that the Fuzzy TOPSIS accuracy reached 86,4%. This means that the 74 proposed parameters can be used to rank and map the Village Government performance nationally with some minors' adjustment.

Key words: Decision-making, Performance Measurement, Village Government,
Fuzzy TOPSIS

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas semua limpahan ridha, rahmat, berkah dan karunia-Nya serta sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Magister Teknik pada Bidang Keahlian Telematika, Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

Proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini telah banyak mendapat bantuan, bimbingan, masukan dan dukungan dari berbagai pihak. Sehingga dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepala Bidang Telematika Departemen Teknik Elektro, Bapak Dr. Adhi Dharma Wibawa, S.T., M.T., atas segala ilmu, bimbingan, arahan dan motivasi selama perkuliahan, sehingga penulis mendapatkan banyak wawasan dan pengalaman yang sangat berguna dan bermanfaat baik dalam mendukung akademik maupun untuk diimplementasikan dalam dunia kerja.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Mauridhi Hery Purnomo, M.Eng. dan Bapak Dr. Adhi Dharma Wibawa, S.T., M.T. selaku pembimbing, atas segala kesabaran, nasihat, arahan, ilmu, motivasi dan dukungan selama proses penyusunan tesis ini. Sehingga sangat banyak wawasan dan pengalaman yang berguna dan bermanfaat bagi penulis untuk dapat menyusun karya ilmiah yang baik dan berkualitas.
3. Bapak Dr. Ir. Wirawan, DEA., Bapak Eko Setijadi, ST., MT., Ph.D., dan Ibu Dr. Diah Puspito Wulandari, S.T., M.Sc. selaku penguji atas segala arahan, masukan dan motivasi untuk perbaikan tesis ini. Sehingga tesis ini dapat tersusun dengan baik.
4. Kedua orang tuaku Bapak Sunari dan Ibu Yayuk Hermi Setyowati, suamiku Yogie Pradhika Yudha Asmara beserta seluruh keluarga besar untuk semua doa, motivasi, semangat dan dukungan setiap saat kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Teman-teman Telematika Angkatan 2020 atas semua bantuan, semangat, kekompakan dan motivasi selama perkuliahan di ITS.
6. Keluarga Besar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun untuk semua bantuan, dukungan, motivasi, semangat dan doa dalam menjalani kesempatan berharga selama kuliah di ITS ini.
7. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk kesempatan dan beasiswa yang sangat bermanfaat, sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan jenjang S2 Telematika dalam program PETIK di ITS dengan baik dan lancar.
8. Seluruh karyawan akademik Pascasarjana Departemen Teknik Elektro dan semua pihak yang telah membantu yang belum dapat disebutkan satu per satu dalam tulisan ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan tesis ini. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memperkaya kajian ilmu tentang telematika, khususnya implementasinya di bidang pemerintahan dan memberi manfaat serta kontribusi bagi semua pembaca.

Surabaya, 17 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan	4
1.4 Batasan Masalah	4
1.5 Kontribusi	5
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Pemerintah	7
2.1.1 Pemerintah Daerah	7
2.1.2 Pemerintah Desa	7
2.1.3 Mekanisme Kinerja Tahunan Pemerintah Desa	7
2.2 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)	10
2.3 Multi Criteria Decision Making (MCDM)	11
2.4 Fuzzy TOPSIS	11
2.4.1 Teori Himpunan Fuzzy	11
2.4.2 Fungsi Keanggotaan Fuzzy	13
2.4.3 Fuzzy Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (Fuzzy TOPSIS)	15
2.5 Pengujian Kuesioner	16
2.5.1 Uji Validitas	16
2.5.2 Uji Reliabilitas	17
2.6 Kajian Literatur	17
2.6.1 Regulasi tentang Penilaian Desa di Indonesia	17
2.6.2 Kajian Penelitian Sebelumnya	19

2.6.3	Kondisi Sosial dan Ekonomi Kabupaten Madiun	24
BAB 3	METODOLOGI PENELITIAN	29
3.1	Konsep Penelitian	29
3.2	Tahap Pengumpulan Data.....	31
3.2.1	Profil Expert	32
3.3	Tahap Konversi Data ke Bilangan Fuzzy	34
3.4	Tahap Pengolahan Data Menggunakan Metode Fuzzy TOPSIS.....	36
3.5	Struktur Data Penelitian	38
3.6	Desain Kuesioner	40
BAB 4	HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1	Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	41
4.2	Hasil Pengolahan Menggunakan Fuzzy TOPSIS	45
4.2.1	Struktur Data untuk Pengolahan Fuzzy TOPSIS.....	45
4.2.2	Syntax Matlab Fuzzy TOPSIS	47
4.2.3	Hasil Perangkingan Menggunakan Fuzzy TOPSIS.....	48
4.2.4	Hasil Klasifikasi Fuzzy TOPSIS	49
4.3	Hasil Penilaian dengan Skor Manual	51
4.3.1	Hasil Skor Manual.....	51
4.3.2	Hasil Klasifikasi Skor Manual.....	52
4.4	Akurasi Klasifikasi antara Fuzzy TOPSIS dengan Skor Manual.....	54
4.5	Karakteristik Kinerja Desa	54
4.5.1	Karakteristik Kinerja Desa Berdasarkan Prinsip-prinsip <i>Good Governance Framework</i>	54
4.5.2	Karakteristik Kinerja Desa Berdasarkan 14 Kriteria <i>Good Governance Framework</i>	57
4.5.3	Tantangan dan Permasalahan Pemerintah Desa	61
BAB 5	PENUTUP	71
5.1	Kesimpulan.....	71
5.2	Saran.....	72
DAFTAR	PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN	77

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kurva Segitiga	14
Gambar 2.2 Peta Kabupaten Madiun.....	25
Gambar 2.3 Jumlah Penduduk.....	25
Gambar 2.4 Pendapatan Per Kapita.....	26
Gambar 2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi	27
Gambar 2.6 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin.....	27
Gambar 2.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	28
Gambar 3.1 Diagram Alir Konsep Penelitian.....	30
Gambar 3.2 Diagram Alir Tahap Pengumpulan Data	32
Gambar 3.3 Diagram Alir Konversi Data ke Bilangan Fuzzy.....	35
Gambar 3.4 Diagram Alir Pengolahan Data dengan Metode Fuzzy TOPSIS.....	37
Gambar 3.5 Struktur Data Penelitian.....	39
Gambar 4.1 Klasifikasi Berdasarkan Fuzzy TOPSIS	50
Gambar 4.2 Klasifikasi Berdasarkan Skor Manual	53
Gambar 4.3 Akurasi Klasifikasi Fuzzy TOPSIS dengan Skor Manual.....	54
Gambar 4.4 Karakteristik Kinerja Desa Berdasarkan Prinsip – prinsip <i>Good Governance Framework</i>	55
Gambar 4.5 Karakteristik Kinerja Desa Berdasarkan 14 Kriteria <i>Good Governance Framework</i>	58
Gambar 4.6 Survey secara online kepada 198 desa.....	62
Gambar 4.7 Permasalahan Tata Kelola Pemerintah Desa ...	63
Gambar 4.8 Jenjang Pendidikan Aparatur Desa.....	63
Gambar 4.9 Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada BPD	66
Gambar 4.10 Publikasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes	66
Gambar 4.11 Kondisi sarana dan prasarana kantor desa	67

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Mekanisme Kinerja Tahunan Pemerintah Desa	8
Tabel 2.2 Regulasi tentang Penilaian Desa di Indonesia.....	17
Tabel 2.3 Kajian Literatur	20
Tabel 3.1 Profil Expert	33
Tabel 3.2 Bilangan Fuzzy untuk Bobot Kriteria dan Alternatif	36
Tabel 3.3 Desain Data Penelitian	40
Tabel 4.1 Butir Pertanyaan Penelitian	42
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas	42
Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas	44
Tabel 4.4 Nilai Kriteria Masing - masing Alternatif	45
Tabel 4.5 Bobot Kriteria.....	45
Tabel 4.6 Nilai Kriteria dalam Bilangan Fuzzy.....	46
Tabel 4.7 Bobot Kriteria dalam Bilangan Fuzzy	46
Tabel 4.8 Hasil Peringkat dengan Fuzzy TOPSIS.....	48
Tabel 4.9 Klasifikasi berdasarkan pengolahan Fuzzy TOPSIS	49
Tabel 4.10 Hasil Klasifikasi Fuzzy TOPSIS	50
Tabel 4.11 Skor Jawaban Kuesioner	51
Tabel 4.12 Hasil Skor Manual 198 Desa.....	51
Tabel 4.13 Klasifikasi Berdasarkan Skor Manual	52
Tabel 4.14 Hasil Klasifikasi Berdasarkan Skor Manual.....	52

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (1) dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan Daerah adalah suatu kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Urusan terkecil yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah mengawal penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan dinamika permasalahan yang muncul di masing-masing daerah, pada tahun 2014 diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur pondasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai sub sistem pemerintahan negara, total desa di Indonesia yang mencapai 74.953 desa [19] menjadi ujung tombak pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang tertuang pada nawacita Presiden nomor 3, yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Langkah nyata pemerintah pusat untuk mendukung desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan adalah dengan mengucurkan dana, salah satunya adalah Dana Desa dengan total nominal anggaran 400 Triliun selama 7 tahun

terakhir. Di sisi lain, desa juga mendapat kucuran dana dari pemerintah provinsi maupun daerah sebagai pendapatannya, antara lain Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Bantuan Keuangan Khusus.

Besarnya anggaran yang harus dikelola desa, belum sebanding dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) baik dari pemerintah pusat, provinsi, daerah maupun desa sendiri. Berbagai faktor melatarbelakangi, seperti tingkat pendidikan, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, kemauan belajar yang rendah serta pengawalan dan pengawasan pemerintah pusat dan daerah yang lemah. Setelah 7 tahun pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terlihat perubahan yang signifikan pada kondisi pedesaan di Indonesia, salah satunya infrastruktur fasilitas umum yang semakin mudah diakses dan dijangkau serta pemberdayaan masyarakat yang mengalami tren baik, misalnya semakin banyak munculnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari masyarakat pedesaan dan berhasil masuk pasar nasional bahkan internasional. Tetapi, disamping kemajuan desa yang pesat, juga banyak muncul masalah dari pemerintahan desa, salah satunya yang paling dominan adalah kerugian negara akibat penyalahgunaan anggaran desa. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) dari tahun 2015 hingga 2019 terdapat 306 kasus di pemerintah desa dan mencapai kerugian negara sebesar Rp 200 Miliar [25].

Faktor-faktor yang mengakibatkan meningkatnya kasus korupsi di pemerintah desa berasal dari pemerintah pusat hingga daerah. Hal ini dimulai dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak berdasarkan proses bisnis sesuai dengan perundangan yang berlaku. Seharusnya penyelenggaraan pemerintah desa berpedoman pada proses bisnis yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hingga turunannya, yaitu dimulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Tetapi banyak pemerintah desa yang melaksanakan tiap fase dari proses bisnis tersebut hanya sebatas menggugurkan kewajiban atau formalitas. Alhasil pelaksanaan anggaran desa belum optimal untuk mengakomodir kebutuhan prioritas masyarakat dan belum tepat sasaran. Faktor berikutnya adalah pengawalan dan evaluasi dari pemerintah pusat maupun daerah yang tidak dilaksanakan secara intensif dan terukur. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dengan

jangkauan wilayah yang luas. Sehingga pengawalan dan evaluasi untuk pemerintah desa tidak dapat berjalan optimal. Padahal untuk meningkatkan keberhasilan proyek atau kegiatan, harus didukung dengan proses pemantauan dan evaluasi oleh tim, dimana faktor-faktor pendukung dalam proses ini antara lain komunikasi, komitmen, pola kepemimpinan, manajemen politik, pengelolaan permintaan masyarakat dan motivasi [7]. Faktor selanjutnya adalah pengawasan auditor eksternal maupun internal pemerintah yang lemah, karena dilakukan secara sampling dan tidak berdasarkan data yang valid.

Kondisi pemerintahan semacam ini telah berjalan selama tujuh tahun dan selalu menemui masalah berulang setiap tahunnya. Penelitian sebelumnya masih dilakukan sebatas analisis faktor pada tiap fase pekerjaan pemerintah desa. Sehingga, belum dapat menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pemerintah desa secara komprehensif untuk menjadi dasar penilaian atau pengukuran kinerja pemerintah desa. Oleh karena itu, peneliti bermaksud ingin membuat sebuah acuan atau standard penilaian kinerja pemerintah desa secara komprehensif melalui pendekatan kerangka kerja tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance Framework*) berdasarkan penelitian Rathin Biswas, dkk (2019) yang terdiri atas 13 kriteria, yaitu *Accountability, Transparency, Participation, Effectiveness, Equality, Vision and Planning, Sustainability, Legitimacy and Bureaucracy, Civic Capacity, Service Delivery, Efficient Economy, Relationship and Security* [17]. Standard penilaian kinerja tersebut akan digunakan sebagai alat ukur untuk melakukan analisis pengambilan keputusan desa berkinerja terbaik menggunakan salah satu metode Multi Criteria Decision Making (MCDM), yaitu Fuzzy Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (Fuzzy TOPSIS). Metode Fuzzy TOPSIS sering digunakan sebagai salah satu metode untuk pengambilan keputusan berdasarkan jumlah kriteria yang banyak (*multi criteria*). Metode ini didasarkan pada konsep dimana alternatif yang terbaik memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif dan memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif [1][3][23].

Hasil metode Fuzzy TOPSIS pada penelitian ini berupa perangkingan desa mulai dari yang terbaik hingga yang terburuk. Hasil ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan terkait *reward* dan *punishment*

kepada pemerintah desa, membantu dalam penyusunan program dan kegiatan pemerintah daerah dalam menyelesaikan akar masalah yang muncul di pemerintahan desa dan mengoptimalkan sistem informasi pengawalan dan evaluasi pemerintahan desa.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan di sektor penyelenggaraan pemerintahan desa seperti penyalahgunaan anggaran, penggelembungan (*mark up*) anggaran, pelaksanaan proyek fiktif, laporan keuangan fiktif, penggelapan anggaran dan produk perencanaan yang tidak berkualitas merupakan dampak dari belum adanya pengukuran kinerja pemerintah desa yang komprehensif, terukur dan terstandar. Untuk mengurai permasalahan berulang tersebut, perlu dilakukan mekanisme teknis menilai atau mengukur kinerja pemerintah desa secara komprehensif untuk memetakan kondisi masing-masing desa.

Hasil dari evaluasi akan digunakan untuk merangking dan memetakan kondisi seluruh desa di Kabupaten Madiun, sehingga dapat memberikan pertimbangan untuk penyusunan kebijakan terkait *reward* dan *punishment* kepada pemerintah desa, membantu dalam penyusunan program dan kegiatan pemerintah daerah dalam menyelesaikan akar masalah yang muncul di pemerintahan desa dan mengoptimalkan sistem informasi pengawalan dan evaluasi pemerintahan desa.

1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perangkingan dan pemetaan pada 198 desa di Kabupaten Madiun berdasarkan penilaian kinerja secara komprehensif melalui pendekatan *Good Governance Framework*.

1.4 Batasan Masalah

Permasalahan pada penelitian ini dibatasi untuk merangking dan memetakan 198 desa di Kabupaten Madiun berdasarkan penilaian kinerja secara komprehensif melalui pendekatan *Good Governance Framework*, sehingga akan didapatkan desa berkinerja terbaik dan terburuk di Kabupaten Madiun.

1.5 Kontribusi

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk:

- a. Menyusun strategi maupun kebijakan pemerintah daerah terkait pemberian *reward* dan *punishment* kepada pemerintah desa.
- b. Menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan pemerintah daerah dalam menyelesaikan akar masalah yang muncul di pemerintah desa.
- c. Mengoptimalkan sistem informasi monitoring dan evaluasi pemerintah desa.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa konsep dan pemikiran dari beberapa disiplin ilmu. Konsep dan pemikiran tersebut dijadikan sebagai landasan berpijak dalam pelaksanaan penelitian. Konsep dan pemikiran tersebut adalah konsep mengenai tata kelola pemerintahan dan sistem pengambilan keputusan. Pada bab ini akan dijelaskan konsep dan pemikiran tersebut secara rinci.

2.1 Pemerintah

Pemerintah merupakan organisasi atau sekumpulan orang yang mempunyai kekuasaan serta lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara, yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara [16].

2.1.1 Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.2 Pemerintah Desa

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memiliki fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia [4].

2.1.3 Mekanisme Kinerja Tahunan Pemerintah Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dijelaskan mekanisme kinerja tahunan Pemerintah

Desa yang dapat dirincikan berdasarkan bulan mulai Januari hingga Desember sebagaimana Tabel 2.1 berikut ini [4][5][10][11]:

Tabel 2.1 Mekanisme Kinerja Tahunan Pemerintah Desa

No.	Bulan	Uraian Pekerjaan
1.	Januari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun berjalan. 2. Penyusunan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tahun anggaran sebelumnya.
2.	Februari	Penyampaian dan Pembahasan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran sebelumnya.
3.	Maret	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) kepada Bupati dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 2. Penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
4.	April	Evaluasi pendahuluan atas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun berjalan.
5.	Mei	Musyawaharah dusun untuk perencanaan tahun depan.
6.	Juni	1. Evaluasi dan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun depan.

No.	Bulan	Uraian Pekerjaan
		<p>2. Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Peraturan Desa tahun berjalan.</p> <p>3. Penyusunan Laporan Keuangan Semester 1.</p>
7.	Juli	<p>1. Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun berjalan.</p> <p>2. Penyampaian Laporan Keuangan Semester 1.</p> <p>3. Pelaksanaan Pra Musyawarah Desa untuk perencanaan tahun depan.</p>
8.	Agustus	<p>1. Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun berjalan.</p> <p>2. Pelaksanaan Musyawarah Desa untuk perencanaan tahun depan.</p>
9.	September	Pelaksanaan Musrenbangdes untuk pembahasan, penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun depan.
10.	Oktober	Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun depan.
11.	November	<p>1. Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun berjalan.</p> <p>2. Pembahasan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun depan.</p>
12.	Desember	<p>1. Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).</p> <p>2. Penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).</p>

2.2 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Menurut International Institute of Administrative Science, Tata kelola pemerintahan merupakan suatu gagasan yang lebih luas daripada pemerintah. Tata kelola melibatkan interaksi antara lembaga-lembaga formal dan masyarakat sipil. Tata kelola mengacu pada proses dimana unsur-unsur dalam masyarakat memegang kekuasaan dan otoritas, memberikan pengaruh serta pertimbangan dalam menetapkan kebijakan dan keputusan mengenai kehidupan publik, serta pembangunan ekonomi dan sosial [16].

The World Bank mendefinisikan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai pelaksanaan pembangunan yang solid dan pengelolaan yang bertanggung jawab. Hal ini terkait dengan pemerintahan yang bersih dan bermartabat, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum, partisipatif dan keterbukaan informasi kepada publik [16].

Rathin Biswas, dkk (2019) dalam penelitiannya “*a Good Governance Framework for Urban Management*” menemukan kerangka kerja Good Governance sebagai acuan kinerja yang dapat diterapkan di pemerintah daerah/lokal. Peneliti melakukan perbandingan dan analisis terhadap 22 kerangka kerja tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance Framework*) yang digunakan di seluruh dunia dalam buku “*A Users’ Guide to Measuring Local Governance*” yang diterbitkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) dan didapatkan kerangka kerja baru yang terdiri atas 13 kriteria, yaitu [17] :

- a. *Accountability*
- b. *Transparency*
- c. *Participation*
- d. *Effectiveness*
- e. *Equality*
- f. *Vision and Planning*
- g. *Sustainability*
- h. *Legitimacy and Bureaucracy*
- i. *Civic Capacity*

- j. *Service Delivery*
- k. *Efficient Economy*
- l. *Relationship*
- m. *Security*

Salah satu tujuan kerangka kerja ini adalah sebagai acuan dalam melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah/lokal berdasarkan mekanisme kinerja tahunan.

2.3 Multi Criteria Decision Making (MCDM)

Multi Criteria Decision Making (MCDM) adalah suatu metode pengambilan keputusan untuk menetapkan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Kriteria biasanya berupa ukuran-ukuran, aturan-aturan atau standar yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah MCDM [1], antara lain sebagai berikut:

- Simple Additive Weighting (SAW)
- Weighted Product Model (WPM)
- Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)
- Analytical Hierarchy Process (AHP)

2.4 Fuzzy TOPSIS

2.4.1 Teori Himpunan Fuzzy

Teori himpunan fuzzy merupakan kerangka matematis yang digunakan untuk mempresentasikan ketidakpastian, ketidakjelasan, ketidaktepatan, kekurangan informasi dan kebenaran parsial. Komponen utama yang sangat berpengaruh pada teori himpunan fuzzy adalah fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan mempresentasikan derajat kedekatan suatu objek terhadap atribut tertentu [1][3][8].

Himpunan pada konsep dasar fuzzy ada 2, yaitu himpunan *crisp* (tegas) dan himpunan *fuzzy* (samar). Himpunan *crisp* merupakan

himpunan suatu item x dalam suatu himpunan A , yang sering ditulis dengan $\mu_A[x]$ dan memiliki 2 kemungkinan, yaitu :

- Satu (1), yang berarti bahwa suatu item menjadi anggota dalam suatu himpunan, atau
- Nol (0), yang berarti bahwa suatu item tidak menjadi anggota dalam suatu himpunan.

Nilai keanggotaan pada himpunan crisp hanya ada 2 kemungkinan, yaitu 0 atau 1. Sedangkan pada himpunan fuzzy, nilai keanggotaan terletak pada rentang 0 sampai 1. Apabila x memiliki nilai keanggotaan *fuzzy* $\mu_A[x]=0$ berarti x tidak menjadi anggota himpunan A , demikian pula apabila x memiliki nilai keanggotaan *fuzzy* $\mu_A[x]=1$ berarti x menjadi anggota penuh pada himpunan A .

Beberapa hal yang perlu diketahui dalam memahami sistem fuzzy, yaitu:

a. Variabel Fuzzy

Variabel fuzzy merupakan variabel yang hendak dibahas dalam suatu sistem fuzzy.

b. Himpunan Fuzzy

Himpunan fuzzy merupakan suatu kelompok yang mewakili suatu kondisi atau keadaan tertentu dalam suatu variabel fuzzy.

c. Semesta Pembicaraan

Semesta pembicaraan adalah keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy. Semesta pembicaraan merupakan himpunan bilangan real yang senantiasa naik (bertambah) secara monoton dari kiri ke kanan. Nilai semesta pembicaraan dapat berupa bilangan positif maupun negatif.

d. Domain

Domain himpunan fuzzy adalah keseluruhan nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan dan diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy. Nilai domain dapat berupa bilangan positif maupun negatif.

Operasi aljabar bilangan *Fuzzy* adalah sebagai berikut :

1. Penjumlahan Bilangan *Fuzzy*

Misalkan A dan B adalah dua himpunan bilangan *fuzzy* yang direpresentasikan (a_1, a_2, a_3) dan (b_1, b_2, b_3) , maka operasi penjumlahannya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} A(+)B &= (a_1, a_2, a_3) (+) (b_1, b_2, b_3) \\ &= (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3) \end{aligned} \quad (2.1)$$

2. Pengurangan Bilangan *Fuzzy*

Misalkan A dan B adalah dua himpunan bilangan *fuzzy* yang direpresentasikan (a_1, a_2, a_3) dan (b_1, b_2, b_3) , maka operasi pengurangannya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} A(-)B &= (a_1, a_2, a_3) (-) (b_1, b_2, b_3) \\ &= (a_1 - b_1, a_2 - b_2, a_3 - b_3) \end{aligned} \quad (2.2)$$

3. Perkalian Bilangan *Fuzzy*

Misalkan A dan B adalah dua himpunan bilangan *fuzzy* yang direpresentasikan (a_1, a_2, a_3) dan (b_1, b_2, b_3) , maka operasi perkaliannya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} A(\times)B &= (a_1, a_2, a_3) (\times) (b_1, b_2, b_3) \\ &= (a_1 \cdot b_1, a_2 \cdot b_2, a_3 \cdot b_3) \end{aligned} \quad (2.3)$$

4. Pembagian Bilangan *Fuzzy*

Misalkan A dan B adalah dua himpunan bilangan *fuzzy* yang direpresentasikan (a_1, a_2, a_3) dan (b_1, b_2, b_3) , maka operasi pembagiannya adalah sebagai berikut :

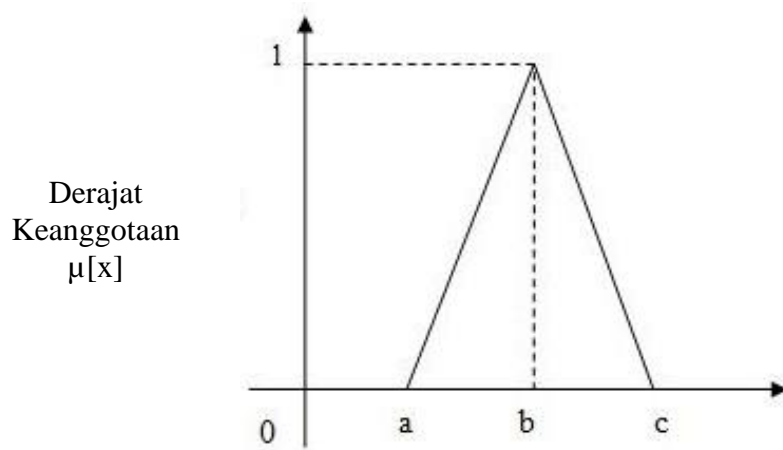
$$\begin{aligned} A(/)B &= (a_1, a_2, a_3) (/) (b_1, b_2, b_3) \\ &= (a_1/b_3, a_2/b_2, a_3/b_1) \end{aligned} \quad (2.4)$$

2.4.2 Fungsi Keanggotaan *Fuzzy*

Fungsi keanggotaan (*membership function*) atau sering disebut dengan derajat keanggotaan adalah suatu kurva yang menunjukkan

pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya yang memiliki interval antara 0 sampai 1 [1][3][8].

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan nilai keanggotaan yaitu melalui pendekatan fungsi kurva segitiga. Kurva segitiga pada dasarnya merupakan gabungan antara 2 garis linier serta ditandai oleh adanya tiga parameter (a, b, c) yang menentukan koordinat x dari tiga sudut. Fungsi keanggotaan segitiga paling umum digunakan dalam penerapan aplikasi fuzzy logic. Representasi fungsi keanggotaan untuk kurva segitiga adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kurva Segitiga

Nilai derajat keanggotaan didapatkan melalui persamaan berikut ini :

$$\mu_x \begin{cases} \frac{x-a}{b-a}; a \leq x \leq b \\ 1; x = b \\ \frac{c-x}{c-b}; b \leq x \leq c \\ 0; x \leq a \text{ atau } x \geq c \end{cases} \quad (2.5)$$

Melalui pendekatan fungsi kurva segitiga, variabel linguistik dalam pengukuran sebuah penelitian dapat direpresentasikan dengan bilangan fuzzy, misalnya sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang.

2.4.3 Fuzzy Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (Fuzzy TOPSIS)

Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) dikembangkan oleh Yo on dan Hwang pada tahun 1980 sebagai alternatif metode pengambilan keputusan yang memiliki banyak kriteria atau atribut. TOPSIS didasarkan pada konsep dimana alternatif yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Konsep ini banyak digunakan pada beberapa model Multi Criteria Decision Making (MCDM) dan Multi Attribute Decision Making (MADM) untuk menyelesaikan masalah keputusan secara praktis. Hal ini disebabkan karena konsepnya sederhana dan mudah dipahami, komputasinya efisien, dan memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif - alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana. Metode ini dapat dikombinasikan menjadi satu dengan metode lain untuk menyelesaikan masalah pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, *experts* dapat menggunakan bilangan crisp (tegas/bulat) maupun bilangan linguistik. Pada kondisi tertentu, *experts* lebih mudah menggunakan bilangan linguistik dalam menyelesaikan masalah untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu dibutuhkan metode TOPSIS yang dikombinasikan dengan metode fuzzy untuk penyelesaiannya [1][3][8]. Langkah - langkah metode Fuzzy TOPSIS adalah sebagai berikut :

1. Menentukan matriks keputusan yang ternormalisasi.

$$\begin{aligned} \text{Benefit Criteria} \quad \tilde{r}_{ij} &= \left(\frac{a_{ij}}{c_j^*}, \frac{b_{ij}}{c_j^*}, \frac{c_{ij}}{c_j^*} \right); c_j^* = \max_i \{c_{ij}\} \\ \text{Cost Criteria} \quad \tilde{r}_{ij} &= \left(\frac{a_j^-}{c_{ij}}, \frac{a_j^-}{b_{ij}}, \frac{a_j^-}{a_{ij}} \right); a_j^- = \min_i \{a_{ij}\} \end{aligned} \quad (2.6)$$

2. Menghitung matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot.

$$\tilde{w}_{ij} = \tilde{r}_{ij} \times w_j \quad (2.7)$$

3. Menghitung matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif.

$$A^* = (\tilde{v}_1^*, \tilde{v}_2^*, \dots, \tilde{v}_n^*); \tilde{v}_j^* = \max_i \{v_{ij3}\} \quad (2.8)$$

$$A^- = (\tilde{v}_1^-, \tilde{v}_2^-, \dots, \tilde{v}_n^-); \tilde{v}_j^- = \min_i \{v_{ij}\} \quad (2.9)$$

4. Menghitung jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan solusi ideal negatif.

$$d(\tilde{x}, \tilde{y}) = \sqrt{\frac{1}{3} [(a_1 - a_2)^2 + (b_1 - b_2)^2 + (c_1 - c_2)^2]} \quad (2.10)$$

$$d_i^* = \sum_{j=1}^n d(\tilde{v}_{ij}, \tilde{v}_j^*) \quad (2.11)$$

$$d_i^- = \sum_{j=1}^n d(\tilde{v}_{ij}, \tilde{v}_j^-) \quad (2.12)$$

5. Menghitung nilai preferensi untuk setiap alternatif (*Closeness Coefficient*).

$$CC_i = \frac{d_i^-}{d_i^- + d_i^*} \quad (2.13)$$

Nilai preferensi terbesar merupakan alternatif terbaik dan sebaliknya nilai preferensi terkecil adalah alternatif terburuk.

2.5 Pengujian Kuesioner

2.5.1 Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas menggunakan Korelasi Bivariate (Pearson Correlation). Jika hasil pengujian menunjukkan r hitung $\geq r$ tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan pada kuesioner berkorelasi signifikan terhadap skor total butir pertanyaan, sehingga dinyatakan valid [13].

2.5.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur yang digunakan dalam penelitian. Reliabilitas merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi dan akurasi. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliabel. Pengujian konsistensi ini menggunakan Alpha's Cronbach [13]. Rentangan nilai koefisien alpha berkisar antara 0 sampai dengan 1 dengan penjelasan sebagai berikut:

- 0 = Tidak memiliki reliabilitas (no reliability)
- > 0.70 = Reliabilitas yang dapat diterima (acceptable reliability)
- > 0.80 = Reliabilitas yang baik (good reliability)
- 0.90 = Reliabilitas yang sangat baik (excellent reliability)
- 1 = Reliabilitas sempurna (perfect reliability)

2.6 Kajian Literatur

2.6.1 Regulasi tentang Penilaian Desa di Indonesia

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa kajian penelitian sebelumnya yang telah dilegalkan dalam Peraturan Perundang-undangan dan telah diterapkan di Indonesia. Beberapa metode pengukuran tingkat perkembangan desa telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2007. Berikut dijelaskan secara rinci pada Tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2 Regulasi tentang Penilaian Desa di Indonesia

No.	Dasar Regulasi	Uraian Pengukuran	Klasifikasi Penilaian
1.	Permendagri No.12 Tahun 2007	Pengukuran tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam,	<ul style="list-style-type: none">• Mula• Madya• Lanjut

No.	Dasar Regulasi	Uraian Pengukuran	Klasifikasi Penilaian
		sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan.	
2.	UU No.6 Tahun 2014 dan Data Potensi Desa BPS Tahun 2014	Pengukuran tentang tingkat kemajuan dan perkembangan pembangunan desa berdasarkan 5 dimensi, yaitu Pelayanan Dasar, Infrastruktur, Aksesibilitas/Transportasi, Pelayanan Umum dan Penyelenggaraan Pemerintahan.	<ul style="list-style-type: none"> • Mandiri • Berkembang • Tertinggal
3.	Permendagri No. 81 Tahun 2015	Pengukuran tentang tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan	<ul style="list-style-type: none"> • Cepat Berkembang • Berkembang • Kurang Berkembang

No.	Dasar Regulasi	Uraian Pengukuran	Klasifikasi Penilaian
		serta tahapan kemajuan desa dan kelurahan.	
4.	Permendes PDTT No. 2 Tahun 2016	Pengukuran untuk menghasilkan Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa yang digunakan untuk menangani pengentasan desa tertinggal.	<ul style="list-style-type: none"> • Mandiri • Maju • Berkembang • Tertinggal • Sangat Tertinggal

Teknik pengukuran tingkat perkembangan desa yang telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2007 hingga sekarang berfokus pada pengentasan desa tertinggal di Indonesia. Di sisi lain, banyak desa yang terletak pada geografis yang strategis dan memiliki potensi sumber daya alam serta sumber daya manusia yang memadai telah menunjukkan tingkat perkembangan yang signifikan dan telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan desa sesuai dengan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan teknik mengukur atau menilai yang fokus pada tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai dasar evaluasi kinerja pemerintah desa setiap tahunnya.

2.6.2 Kajian Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya tentang penerapan salah satu metode Multi Criteria Decision Making (MCDM), yaitu Fuzzy Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (Fuzzy TOPSIS)

yang menjadi referensi dalam penelitian ini dijelaskan secara rinci pada Tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3 Kajian Literatur

No.	Jurnal	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil
1.	International Journal of Technology in Society	Manindra Rajak dan Krishnendu Shaw, 2019.	Evaluation and selection of mobile health (mHealth) applications using AHP and fuzzy TOPSIS	Penelitian ini bertujuan untuk memilih Mobile Health Application terbaik diantara 10 pilihan berdasarkan 9 kriteria dan 32 sub kriteria menggunakan metode AHP dan Fuzzy TOPSIS. Hasil penelitian menjelaskan bahwa metode AHP berhasil digunakan untuk 9 alternatif, sedangkan metode Fuzzy TOPSIS dapat berhasil pada 10 alternatif.
2.	International Journal of Computer and Industrial Engineering	Mehrbakhsh Nilashi et al, 2019.	Factors influencing medical tourism adoption in Malaysia: A	Penelitian ini bertujuan untuk mencari faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam sektor wisata medis

No.	Jurnal	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil
			DEMATEL Fuzzy TOPSIS approach	<p>di Malaysia. Peneliti menggunakan dua metode MCDM, yaitu DEMATEL dan Fuzzy TOPSIS untuk mendapatkan faktor-faktor yang paling berpengaruh berdasarkan 16 kriteria. Metode DEMATEL digunakan untuk mencari hubungan antar faktor dan Fuzzy TOPSIS digunakan untuk mencari faktor yang paling penting atau berpengaruh. Hasilnya didapatkan bahwa faktor sumber daya manusia dan teknologi merupakan faktor yang paling penting untuk mendukung kesuksesan wisata medis di Malaysia.</p>

No.	Jurnal	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil
3.	Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi	Nova Rijati dkk, 2020.	Fuzzy Multi-Attribute Decision Making untuk Klasifikasi Potensi Kewirausahaan Berdasarkan Theory of Planned Behavior	Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan metode Multi Attribute Decision Making (MADM) untuk mengetahui potensi kewirausahaan berdasarkan Theory of Planned Behaviour (TPB) yang terdiri dari 14 kriteria. Metode yang diujikan adalah Fuzzy SAW, Fuzzy TOPSIS dan Fuzzy SAW-TOPSIS. Hasilnya adalah metode Fuzzy SAW-TOPSIS memiliki kinerja yang paling optimal.
4.	Jurnal Nasional Teknologi Industri	Ayu Tiara Suci dkk, 2020.	Metode Fuzzy TOPSIS Pada Pengambilan Keputusan Rekrutmen Karyawan PT.	Penelitian ini bertujuan untuk memberikan Teknik pengambilan keputusan dalam rekrutmen karyawan di PT. Erporate

No.	Jurnal	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil
			Erporate Solusi Global	Solusi Global. Hasilnya, metode Fuzzy TOPSIS dapat di implementasikan untuk pengambilan keputusan rekrutmen karyawan, karena memberikan hasil berupa peringkat di setiap tahapan seleksi.
5.	International Journal of Intelligent Engineering and Systems	Nova Rijati et al, 2020.	A Decision Making and Clustering Method Integration based on the Theory of Planned Behavior for Student Entrepreneurial Potential Mapping in Indonesia	Percobaan pada penelitian ini menunjukkan bahwa metode Fuzzy SAW-TOPSIS dan metode clustering dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam melakukan evaluasi potensi kewirausahaan pada mahasiswa.

Berdasarkan pengkajian dan pendalaman literatur, peneliti melakukan perbandingan dua metode yang termasuk dalam Multi Criteria Decision Making (MCDM) yaitu Fuzzy TOPSIS dan Analytical Hierarchy Process (AHP). Pada metode Fuzzy TOPSIS dibutuhkan data dari dua pihak, yaitu

obyek yang akan menjadi alternatif pilihan dan para ahli (*expert*) yang akan memberikan bobot kepentingan pada kriteria penilaian. Algoritma penghitungan matematis serta komputasi pada Fuzzy TOPSIS tergolong sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, hasil akhir Fuzzy TOPSIS untuk memilih alternatif pilihan terbaik memperhitungkan dua kondisi, yaitu dari solusi ideal positif dan solusi ideal negatifnya.

Metode AHP juga merupakan salah satu metode yang termasuk dalam MCDM dan sering digunakan dalam penyelesaian masalah pengambilan keputusan yang memiliki struktur hirarki dan kompleks. Data pada metode AHP diberikan oleh para ahli (*expert*) yang memiliki kapabilitas dan kemampuan pada bidang permasalahan tertentu yang akan diselesaikan. Data yang akan diolah merupakan data hasil persepsi pada expert. Metode ini memperhitungkan konsistensi logis dari para expert dalam menentukan keputusan. Algoritma penghitungan matematis serta komputasi pada metode AHP tergolong sederhana dan mudah dipahami. Jika dibandingkan dengan metode Fuzzy TOPSIS, metode AHP memiliki potensi bias yang lebih besar karena input utama berasal dari para expert dan dapat menghasilkan keputusan yang kurang tepat jika pemberian nilai para expert terdapat kekeliruan dan tidak konsisten. Metode AHP membutuhkan kapabilitas dan pengalaman yang tinggi dari para expert karena harus memberikan penilaian secara rinci terhadap semua alternatif pilihan yang akan diputuskan. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan menyelaraskan permasalahan yang akan diselesaikan pada penelitian ini, maka peneliti memilih metode Fuzzy TOPSIS di mana data didapatkan dari alternatif pilihan yaitu seluruh desa dan para expert sebagai pemberi bobot kepentingan kriteria penilaian.

2.6.3 Kondisi Sosial dan Ekonomi Kabupaten Madiun

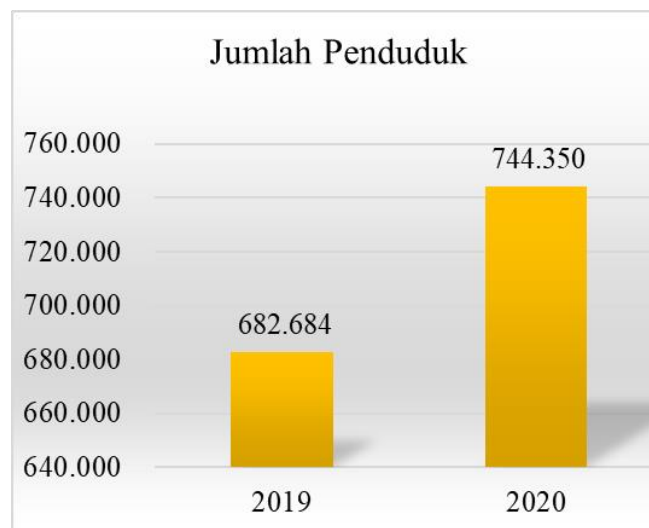
Kabupaten Madiun merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki 15 kecamatan, yaitu Dolopo, Kebonsari, Geger, Dagangan, Kare, Wungu, Madiun, Jiwana, Sawahan, Balerejo, Wonoasri, Pilangkenceng, Mejayan, Saradan, dan Gemarang. Secara administratif, Kabupaten Madiun

memiliki 198 desa dan 8 kelurahan. Kabupaten Madiun memiliki wilayah seluas 101.086 Ha.



Gambar 2.2 Peta Kabupaten Madiun

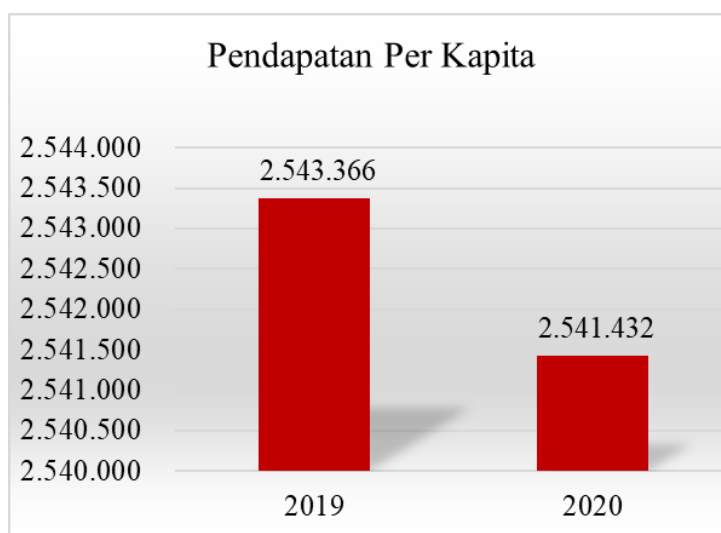
Jumlah penduduk Kabupaten Madiun pada tahun 2020 sebagaimana pada Gambar 2.3 adalah 744.350 jiwa. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Madiun bermatapencaharian sebagai petani.



Gambar 2.3 Jumlah Penduduk

Pendapatan perkapita merupakan ukuran yang sering digunakan untuk mengukur kemakmuran masyarakat dalam suatu daerah dan menjadi salah satu komponen untuk mengukur pendapatan daerah. Pendapatan rata – rata penduduk

Kabupaten Madiun pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2019 akibat dampak pandemi COVID-19, yaitu sebesar Rp 2.541.432,00. Hal ini juga berdampak pada turunnya laju pertumbuhan ekonomi secara drastis di Kabupaten Madiun pada tahun 2020, yaitu sebesar -1,69 dari 5,42 pada tahun 2019 sebagaimana pada Gambar 2.5.



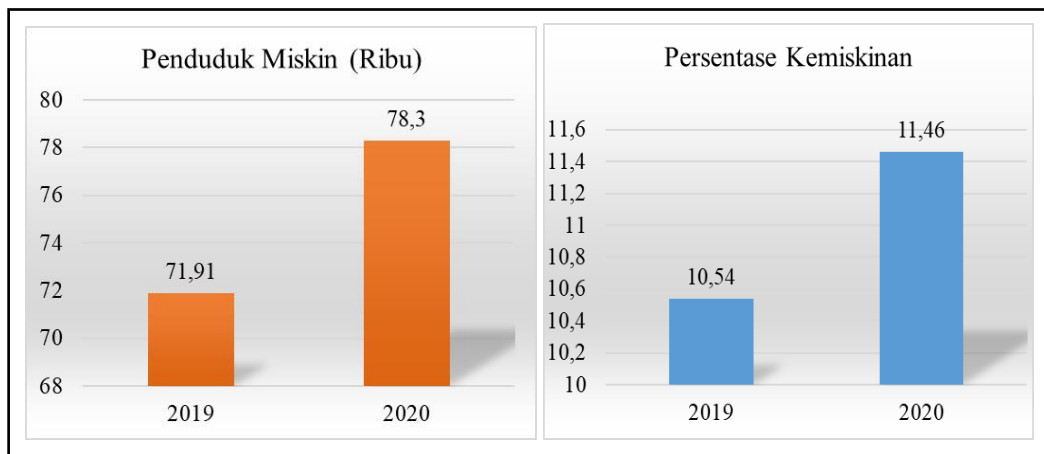
Gambar 2.4 Pendapatan Per Kapita

Di Kabupaten Madiun kontribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar adalah pada sektor pertanian dengan angka 26,51% disusul dengan sektor konstruksi sebesar 12,36% dan industri pengolahan sebesar 11%. Selanjutnya sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor sebesar 7,51%. Sektor informasi dan komunikasi berkontribusi sebesar 8,74%, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 5,38%, jasa pendidikan berkontribusi 4,52%, jasa keuangan dan asuransi berkontribusi 2,92%, jasa lainnya berkontribusi 2,65%, penyediaan akomodasi dan makan minum dengan kontribusi 2,55%, real estate berkontribusi 1,88%, transportasi pergudangan berkontribusi 1,75%, pertambangan dan penggalian dengan kontribusi 0,95%, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 0,92% dan jasa perusahaan dengan kontribusi sebesar 0,35%.



Gambar 2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Selain turunnya laju pertumbuhan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19, terdapat efek domino yang terjadi pada aspek sosial dan ekonomi di Kabupaten Madiun, yaitu meningkatnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2020, yaitu sebanyak 78.300 orang dibandingkan tahun 2019 yaitu sebanyak 71.910 orang sebagaimana Gambar 2.6.



Gambar 2.6 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Terdapat kenaikan IPM pada tahun 2019 ke 2020 di Kabupaten Madiun yaitu dari 71,69 menjadi 71,73 sesuai Gambar 2.7. Nilai IPM berada pada

rentang 0 – 100. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.



Gambar 2.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas memiliki produktivitas tinggi sehingga mampu meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi dan secara agregat dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor input sekaligus tujuan utama dari proses target pemerintah untuk meningkatkan pembangunan. Keberhasilan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pembangunan sumber daya manusia akan tercermin dari IPM. Hal ini dikarenakan komposit pembentuk nilai IPM terdiri dari tiga aspek yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Daya Beli. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2019, upaya pembangunan sumber daya manusia yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Madiun relatif baik dan mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak tahun 2015-2020. Sehingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Madiun yaitu 71,73 masih di atas IPM Provinsi yaitu 71,71 dan berada di urutan 19 dari 38 kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur.

BAB 3

METODE PENELITIAN

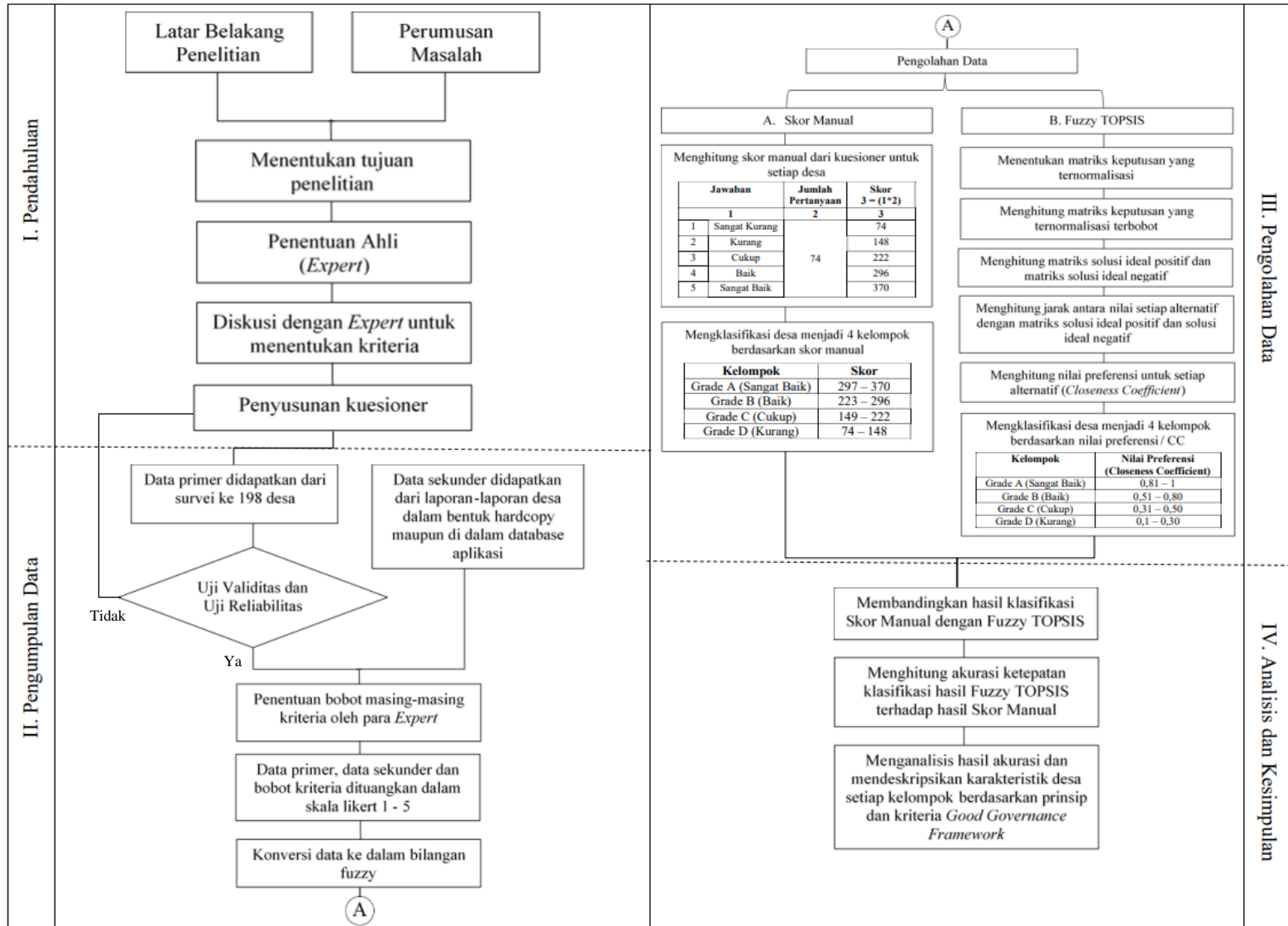
3.1 Konsep Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencari pedoman atau standard evaluasi yang terukur atas hasil serangkaian pekerjaan pemerintah desa yang dilaksanakan secara tahunan. Sehingga akan didapatkan teknis penilaian atau pengukuran kinerja pemerintah desa setiap tahunnya yang berguna untuk merangking dan memetakan kondisi desa di Kabupaten Madiun secara makro.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer yang bersumber dari survey terhadap 198 desa di Kabupaten Madiun dan data sekunder yang bersumber dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Madiun.

Penelitian dimulai dengan pengkajian dan diskusi tentang kerangka kerja Good Governance dengan 7 orang *expert* yang terdiri dari 4 orang *expert* internal dan 3 orang *expert* eksternal. Selanjutnya berdasarkan kerangka kerja Good Governance yang disepakati, didapatkan kriteria yang menjadi dasar penyusunan kuesioner.

Survey dilakukan secara online menggunakan Aplikasi Zoom dan dipandu oleh peneliti serta perwakilan *expert* kepada 198 desa di Kabupaten Madiun sebagai responden. Sedangkan data sekunder akan direkap dan dikompilasi peneliti dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Selanjutnya data akan diolah menggunakan metode Fuzzy TOPSIS dan akan didapatkan hasil berupa perangkingan 198 desa di Kabupaten Madiun. Selanjutnya, hasil perangkingan menggunakan metode Fuzzy TOPSIS akan dibandingkan dengan hasil perangkingan menggunakan skor manual, Berdasarkan perbandingan tersebut akan didapatkan akurasi pemetaan desa di Kabupaten Madiun. Tahap penelitian secara umum digambarkan pada diagram alir sebagaimana Gambar 3.1 di bawah ini:

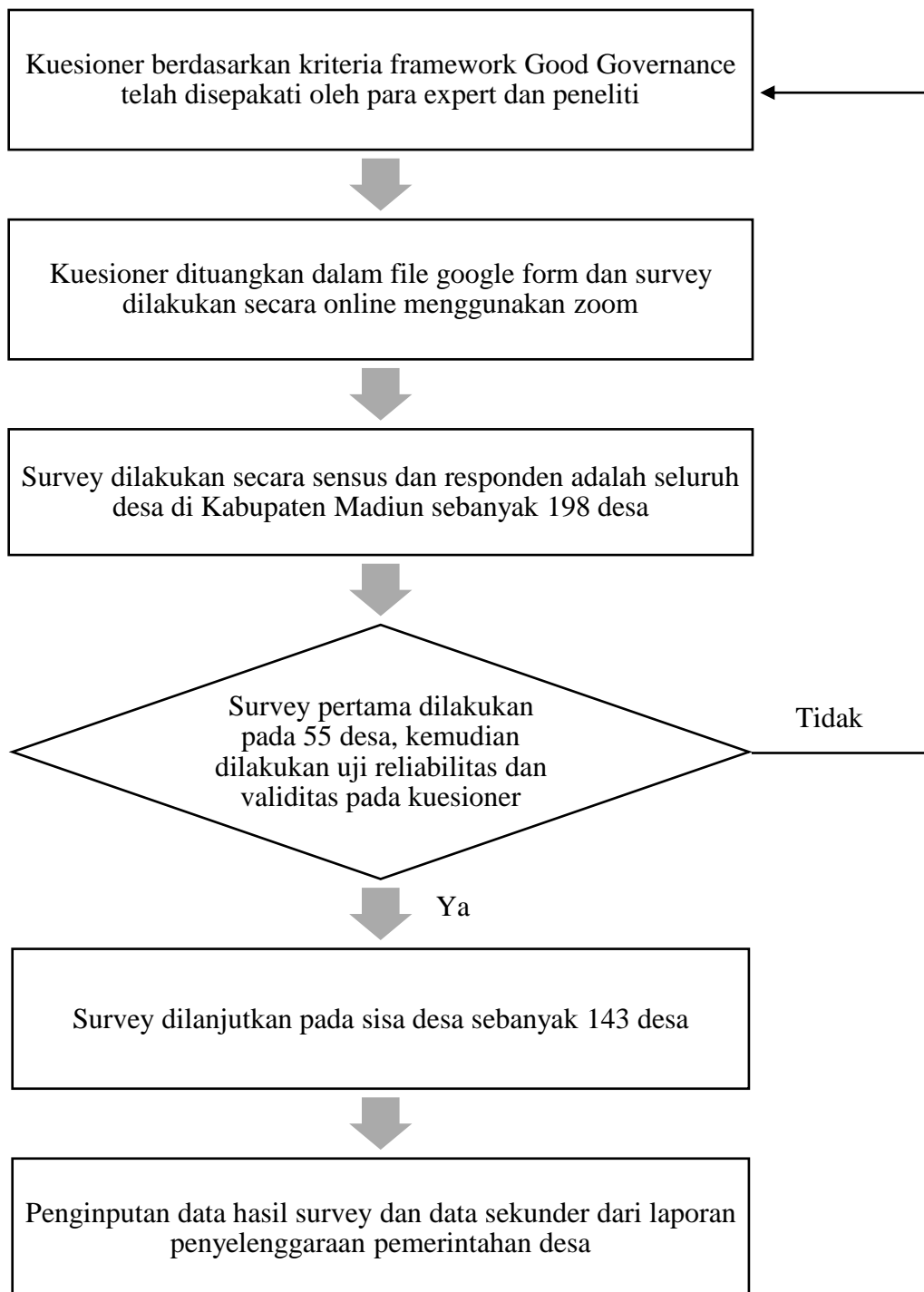


Gambar 3.1 Diagram Alir Konsep Penelitian

3.2 Tahap Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan secara survey kepada 198 desa di Kabupaten Madiun. Sedangkan data sekunder bersumber dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa baik berupa *hardcopy* maupun yang tersimpan dalam *database* aplikasi. Survey dilakukan secara online dengan dipandu oleh peneliti dan perwakilan *expert* kepada 198 desa di Kabupaten Madiun menggunakan Aplikasi Zoom.

Pada tahap pertama dilakukan survey awal dengan responden sebanyak 55 desa. Survey awal ini ditujukan untuk menguji validitas dan reliabilitas kuesioner sebagai alat ukur dalam penelitian ini. Setelah hasil pengujian validitas dan reliabilitas kuesioner telah dinyatakan valid dan reliabel, maka survey lanjutan dilakukan kepada 143 desa dengan mekanisme yang sama. Setelah didapatkan data dari 198 desa, maka tahap selanjutnya adalah penginputan data. Tahap pengumpulan data secara rinci dijelaskan sesuai dengan diagram alir pada Gambar 3.2 di bawah ini :



Gambar 3.2 Diagram Alir Tahap Pengumpulan Data

3.2.1. Profil Expert

Pada penelitian ini diperlukan data bobot kepentingan setiap kriteria yang akan dijadikan penilaian kinerja desa. Data tersebut berasal dari

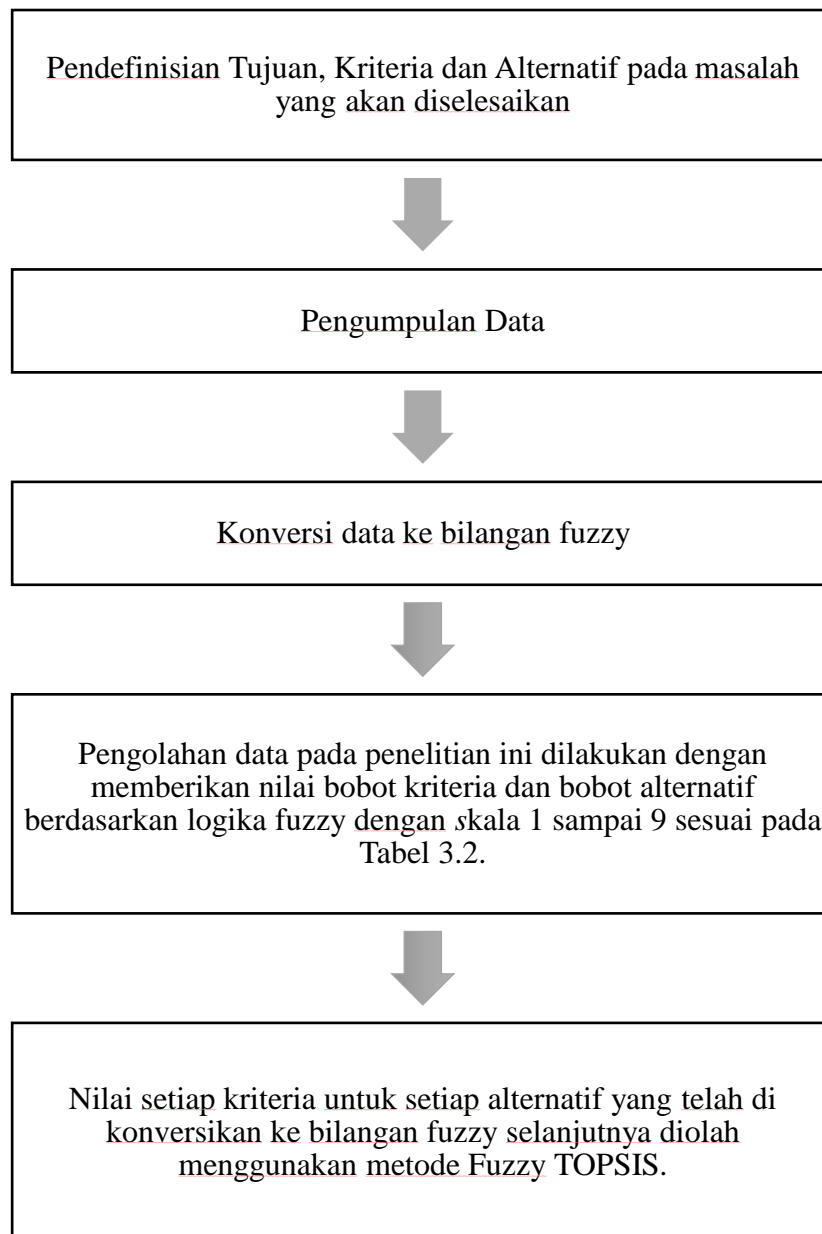
para ahli (*Expert*) di bidang pemerintahan desa yang dinilai memiliki kapabilitas dan pengalaman yang tinggi di bidang pemerintahan desa. Expert dalam penelitian ini berjumlah 7 orang dengan rincian 4 Expert berasal dari Pemerintah Kabupaten Madiun dan 3 Expert berasal dari luar Pemerintah Kabupaten Madiun sebagaimana pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Profil Expert

Nama Expert	Instansi	Jabatan
Expert 1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun	Kepala Dinas
Expert 2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa
Expert 3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama
Expert 4	Inspektorat Kabupaten Madiun	Inspektur Pembantu Wilayah III
Expert 5	Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI)	Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Wilayah I
Expert 6	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI)	Koordinator Pengawasan Desa Wilayah II
Expert 7	Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Analisis Rencana Program Dan Kegiatan

3.3 Tahap Konversi Data ke Bilangan Fuzzy

Penelitian ini ditujukan untuk pengambilan keputusan terhadap beberapa alternatif berdasarkan beberapa kriteria. Alternatif yang dimaksud adalah 198 desa di Kabupaten Madiun dan kriteria yang dimaksud adalah prinsip - prinsip dalam *Good Governance Framework*. Oleh karena itu dimungkinkan sekali jawaban para responden memiliki sifat samar dimana mengandung ketidakpastian, ambiguitas dan kebenaran parsial. Sehingga diperlukan teori himpunan fuzzy untuk mendefinisikan jawaban responden dimaksud, supaya meminimalisir bias dari hasil penelitian ini.



Gambar 3.3 Diagram Alir Konversi Data ke Bilangan Fuzzy

Tahap konversi data ke dalam bilangan fuzzy sesuai dengan diagram alir pada Gambar 3.3 yang pertama adalah mendefinisikan Tujuan, Kriteria dan Alternatif pada masalah yang akan diselesaikan. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan peringkat 1 sampai dengan 198 pada 198 desa di Kabupaten Madiun. Kriteria pada penelitian ini adalah 14 kriteria berdasarkan 9 prinsip Good Governance Framework. Alternatif pada penelitian ini adalah desa di Kabupaten Madiun sejumlah 198 desa.

Tahap berikutnya setelah data didapatkan adalah mengkonversi data ke dalam bilangan fuzzy. Data yang akan dikonversi adalah bobot dari para expert terhadap 14 kriteria dan data hasil survey maupun data sekunder dari 198 desa. Konversi data akan dilakukan berdasarkan logika fuzzy dengan skala 1 sampai 9 sebagaimana Tabel 3.2 di bawah ini :

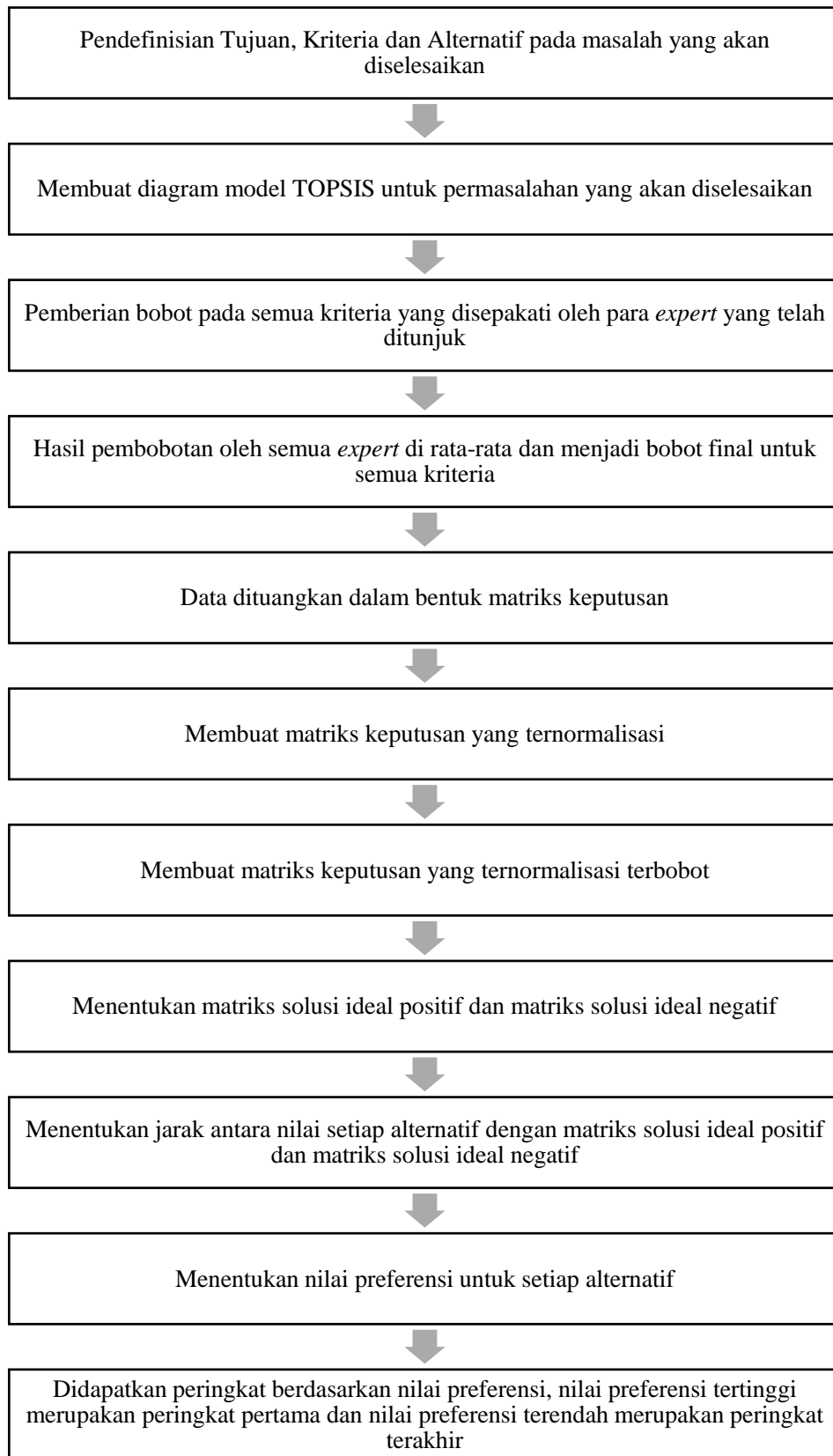
Tabel 3.2 Bilangan Fuzzy untuk Bobot Kriteria dan Alternatif

Bobot Kriteria	Jawaban Alternatif	Bilangan Fuzzy
Sangat Tidak Penting	Sangat Kurang	(1, 1, 3)
Tidak Penting	Kurang	(1, 3, 5)
Cukup Penting	Cukup	(3, 5, 7)
Penting	Baik	(5, 7, 9)
Sangat Penting	Sangat Baik	(7, 9, 9)

Setelah semua data dikonversikan ke dalam bilangan fuzzy, langkah selanjutnya adalah mengolah menggunakan metode Fuzzy TOPSIS.

3.4 Tahap Pengolahan Data Menggunakan Metode Fuzzy TOPSIS

Tahap setelah konversi data ke dalam bilangan fuzzy yaitu mengolah data menggunakan metode Fuzzy TOPSIS sebagaimana digambarkan secara rinci pada Gambar 3.4. Tahap pertama pada metode Fuzzy TOPSIS adalah mendefinisikan tujuan, kriteria dan alternatif pada masalah yang akan diselesaikan pada penelitian ini.

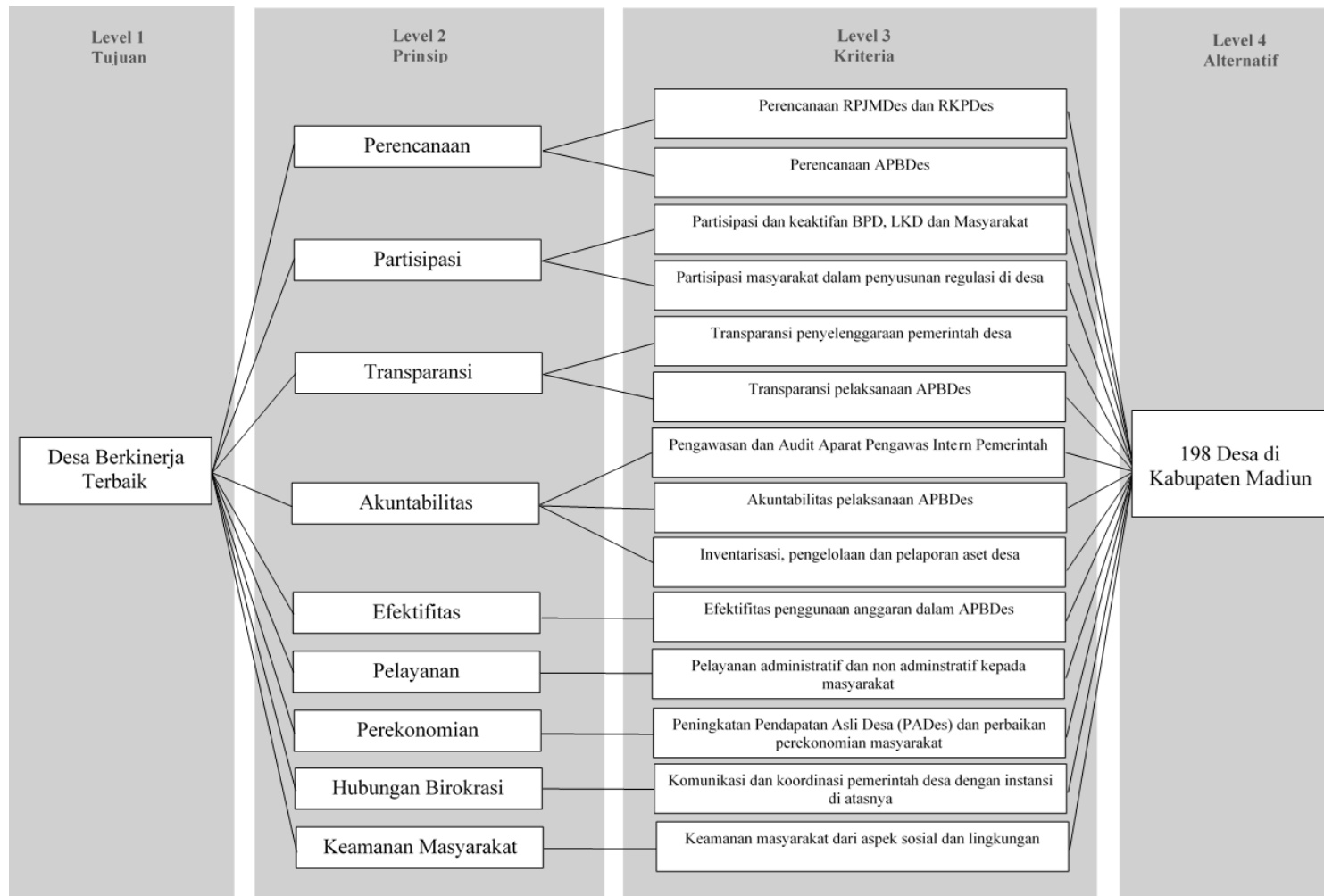


Gambar 3.4 Diagram Alir Pengolahan Data dengan Metode Fuzzy TOPSIS

Tahap kedua adalah pembobotan pada semua kriteria yang disepakati oleh para *expert* yang telah ditunjuk. Kemudian hasil pembobotan oleh semua *expert* di rata-rata dan menjadi bobot final untuk semua kriteria. Langkah selanjutnya adalah membuat matriks keputusan yang ternormalisasi, dilanjutkan menghitung matriks ternormalisasi yang terbobot. Kemudian, menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Setelah itu, menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Tahap akhir adalah menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif dan didapatkan peringkat berdasarkan nilai preferensi tersebut. Nilai preferensi tertinggi merupakan peringkat pertama dan nilai preferensi terendah merupakan peringkat terakhir.

3.5 Struktur Data Penelitian

Struktur data pada penelitian ini terdiri dari 3 level, yaitu level 1 merupakan *Goal* (Tujuan), level 2 merupakan *Principle* (Prinsip), level 3 merupakan *Criteria* (Kriteria) dan level 4 merupakan *Alternative* (Alternatif) yaitu 198 desa di Kabupaten Madiun sebagaimana dirincikan pada Gambar 3.5. Sedangkan desain data pada penelitian ini sesuai pada Tabel 3.3 yaitu pada kolom merupakan 14 kriteria berdasarkan 9 prinsip Good Governance Framework, yaitu Perencanaan, Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas, Efektifitas, Pelayanan, Perekonomian, Hubungan Birokrasi dan Keamanan Masyarakat. Kemudian pada baris merupakan banyaknya alternatif yang merupakan jumlah desa di Kabupaten Madiun sebanyak 198 desa.



Gambar 3.5 Struktur Data Penelitian

Tabel 3.3 Desain Data Penelitian

	Perencanaan RPJMDes dan RKPDes (K1)	Perencanaan APBDes (K2)	Partisipasi dan keaktifan BPD, LKD dan Masyarakat (K3)	...	Keamanan masyarakat dari aspek lingkungan, sosial dan ekonomi (K14)
DESA 1 (A1)	(1,3,5)	(1,1,3)	(3,5,7)	...	(7,9,9)
DESA 2 (A2)	xxx	xxx	xxx	...	xxx
DESA 3 (A3)	xxx	xxx	xxx	...	xxx
DESA 4 (A4)	xxx	xxx	xxx	...	xxx
DESA 5 (A5)	xxx	xxx	xxx	...	xxx
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
DESA 198 (A198)	xxx	xxx	xxx	...	xxx

3.6 Desain Kuesioner

Desain kuesioner pada penelitian ini akan dijelaskan secara rinci pada bagian lampiran.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pengolahan data pada penelitian ini dimulai dari pengujian validitas dan reliabilitas kuesioner, kemudian konversi data ke dalam bilangan fuzzy dan selanjutnya pengolahan menggunakan metode Fuzzy TOPSIS untuk didapatkan peringkat desa di Kabupaten Madiun supaya didapatkan alternatif terbaik dari seluruh desa di Kabupaten Madiun. Hasil perankingan selanjutnya akan digunakan untuk memetakan desa berdasarkan kinerja dalam tata kelola pemerintahannya. Hasil pemetaan menggunakan Fuzzy TOPSIS akan dibandingkan dengan hasil pemetaan berdasarkan skor manual untuk didapatkan tingkat akurasi. Pada akhir analisis akan disajikan karakteristik masing – masing kelompok desa berdasarkan kriteria *Good Governance* dan implementasi prinsip – prinsip *Good Governance* di Kabupaten Madiun.

4.1 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Pada penelitian ini, data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari survey kepada 198 desa menggunakan kuesioner dengan jumlah pertanyaan sebanyak 60 butir pertanyaan. Data sekunder bersumber dari laporan penyelenggaraan desa yang telah dikompilasi oleh peneliti dengan jumlah pertanyaan sebanyak 23 butir pertanyaan. Sehingga total pertanyaan adalah 83 butir secara rinci dijelaskan pada Tabel 4.1. Kuesioner yang menjadi alat ukur untuk data primer dalam penelitian ini, perlu dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan pada 55 desa sebagai responden pertama pada saat survey dilakukan. Hasil uji validitas menunjukkan dari total 60 butir pertanyaan terdapat 51 pertanyaan yang dinyatakan valid sebagaimana pada Tabel 4.2.

Tabel 4.1 Butir Pertanyaan Penelitian

No	Prinsip	No	Kriteria	Jumlah Pertanyaan	
				Primer	Sekunder
1	Perencanaan	1	Perencanaan RPJMDes dan RKPDes	8	2
		2	Perencanaan APBDes	3	1
2.	Partisipasi	3	Partisipasi dan keaktifan BPD, LKD dan masyarakat	6	0
		4	Partisipasi masyarakat dalam penyusunan regulasi di desa	4	0
3.	Transparansi	5	Transparansi penyelenggaraan pemerintah desa	3	1
		6	Transparansi pelaksanaan APBDes	6	2
4.	Akuntabilitas	7	Pengawasan dan Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah	3	0
		8	Akuntabilitas pelaksanaan APBDes	7	1
		9	Inventarisasi, pengelolaan dan pelaporan aset desa	4	0
5.	Efektifitas	10	Efektifitas penggunaan anggaran dalam APBDes	1	2
6.	Pelayanan	11	Pelayanan administratif dan non administratif kepada masyarakat	6	3
7.	Perekonomian	12	Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan perbaikan perekonomian masyarakat	3	7
8.	Hubungan Birokrasi	13	Komunikasi dan koordinasi pemerintah desa dengan instansi di atasnya	3	0
9.	Keamanan Masyarakat	14	Keamanan masyarakat dari aspek sosial dan lingkungan	3	4
Total Pertanyaan sebelum pengujian				60	23
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (hanya data primer)				51	23
Total Pertanyaan setelah pengujian				74	

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas

No.	Butir Pertanyaan	Pearson Correlation	P-Value	r-tabel	Alpha	Keputusan
1	K1_1	0	0	0,265	0,05	Tidak Valid
2	K1_2	0,787	0	0,265	0,05	Valid
3	K1_3	0,266	0,05	0,265	0,05	Valid

No.	Butir Pertanyaan	Pearson Correlation	P-Value	r-tabel	Alpha	Keputusan
4	K1_4	0,363	0,006	0,265	0,05	Valid
5	K1_5	0,339	0,011	0,265	0,05	Valid
6	K1_6	0,22	0,106	0,265	0,05	Tidak Valid
7	K1_7	0,718	0	0,265	0,05	Valid
8	K1_8	0,55	0	0,265	0,05	Valid
9	K2_1	0,202	0,138	0,265	0,05	Tidak Valid
10	K2_2	0,334	0,013	0,265	0,05	Valid
11	K2_3	0,965	0	0,265	0,05	Valid
12	K3_1	0,374	0,005	0,265	0,05	Valid
13	K3_2	0,483	0	0,265	0,05	Valid
14	K3_3	0,332	0,013	0,265	0,05	Valid
15	K3_4	0,54	0	0,265	0,05	Valid
16	K3_5	0,608	0	0,265	0,05	Valid
17	K3_6	0,638	0	0,265	0,05	Valid
18	K4_1	0,55	0	0,265	0,05	Valid
19	K4_2	0,509	0	0,265	0,05	Valid
20	K4_3	0,702	0	0,265	0,05	Valid
21	K4_4	0,604	0	0,265	0,05	Valid
22	K5_1	0,235	0,084	0,265	0,05	Tidak Valid
23	K5_2	0,775	0	0,265	0,05	Valid
24	K5_3	0,658	0	0,265	0,05	Valid
25	K6_1	0,534	0	0,265	0,05	Valid
26	K6_2	0,11	0,424	0,265	0,05	Tidak Valid
27	K6_3	0,764	0	0,265	0,05	Valid
28	K6_4	0,722	0	0,265	0,05	Valid
29	K6_5	0,281	0,037	0,265	0,05	Valid
30	K6_6	0,647	0	0,265	0,05	Valid
31	K7_1	0,666	0	0,265	0,05	Valid
32	K7_2	0,152	0,269	0,265	0,05	Tidak Valid
33	K7_3	0,784	0	0,265	0,05	Valid
34	K8_1	0,26	0,056	0,265	0,05	Tidak Valid
35	K8_2	0,597	0	0,265	0,05	Valid
36	K8_3	0,472	0	0,265	0,05	Valid
37	K8_4	0,525	0	0,265	0,05	Valid
38	K8_5	0,322	0,017	0,265	0,05	Valid
39	K8_6	-0,013	0,927	0,265	0,05	Tidak Valid
40	K8_7	0,394	0,003	0,265	0,05	Valid
41	K9_1	0,322	0,017	0,265	0,05	Valid
42	K9_2	0,573	0	0,265	0,05	Valid
43	K9_3	0,675	0	0,265	0,05	Valid
44	K9_4	0,77	0	0,265	0,05	Valid
45	K10_1	1	0	0,265	0,05	Valid

No.	Butir Pertanyaan	Pearson Correlation	P-Value	r-tabel	Alpha	Keputusan
46	K11_1	0,572	0	0,265	0,05	Valid
47	K11_2	0,589	0	0,265	0,05	Valid
48	K11_3	0,574	0	0,265	0,05	Valid
49	K11_4	0,53	0	0,265	0,05	Valid
50	K11_5	0,248	0,068	0,265	0,05	Tidak Valid
51	K11_6	0,502	0	0,265	0,05	Valid
52	K12_1	0,429	0,001	0,265	0,05	Valid
53	K12_2	0,546	0	0,265	0,05	Valid
54	K12_3	0,617	0	0,265	0,05	Valid
55	K13_1	0,775	0	0,265	0,05	Valid
56	K13_2	0,784	0	0,265	0,05	Valid
57	K13_3	0,576	0	0,265	0,05	Valid
58	K14_1	0,717	0	0,265	0,05	Valid
59	K14_2	0,804	0	0,265	0,05	Valid
60	K14_3	0,677	0	0,265	0,05	Valid

Hasil uji validitas kuesioner terhadap 60 butir pertanyaan didapatkan bahwa 9 butir pertanyaan tidak valid dan 51 pertanyaan dinyatakan valid karena nilai Pearson Correlation 51 pertanyaan lebih besar dari r-tabel sebesar 0,265 dan P-value dari 51 pertanyaan lebih kecil dari alpha sebesar 0,05. Tahapan selanjutnya adalah melakukan pengujian reliabilitas terhadap 51 butir pertanyaan yang dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas terhadap 51 butir pertanyaan didapatkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,749 yang artinya reliabel/konsisten sebagaimana pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas

Jumlah Pertanyaan	Cronbach's Alpha
51	0,749

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas, diketahui bahwa data primer yang layak digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 51 pertanyaan dan data sekunder terdiri dari 23 pertanyaan, sehingga totalnya adalah 74 butir pertanyaan. Tahapan selanjutnya adalah pengolahan menggunakan metode Fuzzy TOPSIS.

4.2 Hasil Pengolahan Menggunakan Fuzzy TOPSIS

Data penelitian yang telah melalui pengujian validitas dan reliabilitas selanjutnya akan diolah menggunakan Fuzzy TOPSIS. Berikut akan dijelaskan tahapan pengolahan menggunakan metode Fuzzy TOPSIS.

4.2.1 Struktur Data untuk Pengolahan Fuzzy TOPSIS

Pada penelitian ini telah didefinisikan alternatif dan kriteria yang akan diolah menggunakan Fuzzy TOPSIS. Alternatif pada penelitian ini merupakan 198 desa di Kabupaten Madiun dan kriteria pada penelitian ini merupakan 14 kriteria berdasarkan *Good Governance Framework*. Nilai kriteria didapatkan dari rata-rata nilai pertanyaan pada masing-masing kriteria sebagaimana dirincikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Nilai Kriteria Masing - masing Alternatif

No.	Desa	K1	K2	K3	...	K14
1	BAL1	3,38	5,00	3,50	...	3,57
2	BAL2	4,38	5,00	3,17	...	3,71
3	BAL3	3,63	5,00	4,00	...	3,14
4	BAL4	3,25	4,33	3,67	...	3,29
5	BAL5	3,50	4,67	3,33	...	3,00
6	BAL6	4,63	4,67	2,83	...	3,57
7	BAL7	4,00	4,67	3,67	...	4,00
8	BAL8	4,00	4,00	3,33	...	3,71
9	BAL9	3,63	3,67	3,50	...	3,71
10	BAL10	3,63	5,00	4,17	...	3,43
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
198	WUN1	4,25	5,00	4,17	...	4,00

Setelah menyusun nilai rata-rata setiap kriteria, selanjutnya adalah menghitung bobot pada setiap kriteria yang didapatkan dari 7 orang *expert* (*expert judgement*) seperti pada Tabel 4.5 di bawah ini.

Tabel 4.5 Bobot Kriteria

Expert	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14
1	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
3	5	5	5	5	5	5	3	5	5	4	5	4	4	4
4	3	4	4	3	4	5	4	5	5	3	3	3	3	3

Expert	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14
5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4
6	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
7	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5
Rata - rata	4,71	4,86	4,71	4,43	4,71	4,86	4,29	4,86	4,57	4,29	4,29	4,29	4,14	4,14

Tahap selanjutnya adalah melakukan konversi nilai rata-rata setiap kriteria pada Tabel 4.4 dan rata – rata bobot kriteria yang didapatkan dari 7 orang expert pada Tabel 4.5 ke dalam bilangan fuzzy berdasarkan bilangan fuzzy yang telah disusun oleh peneliti pada Tabel 3.1.

Tabel 4.6 Nilai Kriteria dalam Bilangan Fuzzy

No.	Desa	K1			K2			K3			...	K14		
1	BAL1	5	7	9	7	9	9	5	7	9	...	5	7	9
2	BAL2	7	9	9	7	9	9	5	7	9	...	5	7	9
3	BAL3	5	7	9	7	9	9	5	7	9	...	5	7	9
4	BAL4	5	7	9	7	9	9	5	7	9	...	5	7	9
5	BAL5	5	7	9	7	9	9	5	7	9	...	3	5	7
6	BAL6	7	9	9	7	9	9	3	5	7	...	5	7	9
7	BAL7	5	7	9	7	9	9	5	7	9	...	5	7	9
8	BAL8	5	7	9	5	7	9	5	7	9	...	5	7	9
9	BAL9	5	7	9	5	7	9	5	7	9	...	5	7	9
10	BAL10	5	7	9	7	9	9	7	9	9	...	5	7	9
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
198	WUN1	7	9	9	7	9	9	7	9	9	...	5	7	9

Tabel 4.7 Bobot Kriteria dalam Bilangan Fuzzy

Kriteria	Bobot		
K1	3,00	8,43	9,00
K2	5,00	8,71	9,00
K3	5,00	8,43	9,00
K4	3,00	7,86	9,00
K5	5,00	8,43	9,00
K6	5,00	8,71	9,00
K7	3,00	7,57	9,00
K8	5,00	8,71	9,00
K9	5,00	8,14	9,00
K10	3,00	7,57	9,00
K11	3,00	7,57	9,00

Kriteria	Bobot		
K12	3,00	7,57	9,00
K13	3,00	7,29	9,00
K14	3,00	7,29	9,00

Data masing-masing alternatif dalam bilangan fuzzy pada Tabel 4.6 dan bobot kriteria dalam bilangan fuzzy pada Tabel 4.7 merupakan data yang akan diolah menggunakan metode Fuzzy TOPSIS.

4.2.2 Syntax Matlab Fuzzy TOPSIS

Tahapan pengolahan menggunakan Fuzzy TOPSIS yaitu:

1. Menentukan matriks keputusan yang ternormalisasi.
2. Menghitung matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot.
3. Menghitung matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif.
4. Menghitung jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan solusi ideal negatif.
5. Menghitung nilai preferensi untuk setiap alternatif (*Closeness Coefficient*).

Nilai preferensi terbesar merupakan alternatif terbaik dan sebaliknya nilai preferensi terkecil adalah alternatif terburuk. Syntax Matlab untuk pengolahan Fuzzy TOPSIS dijelaskan sebagai berikut.

```
allmat = xlsread('datatesisfix','datadesa','D2:AS199');
allbobot = xlsread('datatesisfix','bobot','C12:AR12');
ukuran = size(allmat);
alternatif = ukuran(1,1);
kriteria = ukuran(1,2)/3;

%men cari cj* untuk benefit criteria
for i = 1:kriteria
    cjstar_K(i) = max(allmat(:,i*3));

%menghitung benefit criteria
rij_K(:,i*3-2:i*3)= allmat(:,i*3-2:i*3)/cjstar_K(i);

%menghitung matriks keputusan ternormalisasi
norm_K(:,i*3-2:i*3) = rij_K(:,i*3-2:i*3).*allbobot(:,i*3-2:i*3);

%menghitung A*
Aplus_K(:,i*3-2:i*3) = max(norm_K(:,i*3-2:i*3));
```

```

%menghitung A-
    Aminus_K(:,i*3-2:i*3) = min(norm_K(:,i*3-2:i*3));
end

%menghitung FPIS dan FNIS
for i = 1:kriteria
    for j = 1:alternatif
        FPIS(j,i) = sqrt(1/3*(((norm_K(j,i*3-2)-
Aplus_K(1,i*3-2))^2)+((norm_K(j,i*3-1)-Aplus_K(1,i*3-
1))^2)+((norm_K(j,i*3)-Aplus_K(1,i*3))^2)));
        FNIS(j,i) = sqrt(1/3*(((norm_K(j,i*3-2)-
Aminus_K(1,i*3-2))^2)+((norm_K(j,i*3-1)-Aminus_K(1,i*3-
1))^2)+((norm_K(j,i*3)-Aminus_K(1,i*3))^2)));
    end
end

%menghitung CC
for j = 1:alternatif
    for i = 1:kriteria
        distar(j,1) = sum(FPIS(j,:))
        diminus(j,1) = sum(FNIS(j,:))
        CC(j,1) =
diminus(j,1)/(diminus(j,1)+distar(j,1));
    end
end

disp(CC)

```

4.2.3 Hasil Perangkingan Menggunakan Fuzzy TOPSIS

Berdasarkan pengolahan menggunakan Fuzzy TOPSIS didapatkan nilai preferensi (*Closeness Coefficient*) pada setiap alternatif. Nilai preferensi tertinggi merupakan alternatif terbaik karena merupakan alternatif yang memiliki jarak terdekat dengan solusi ideal positif dan jarak terjauh dengan solusi ideal negatif. Sebaliknya, nilai preferensi terendah merupakan alternatif terburuk, karena memiliki jarak terjauh dengan solusi ideal positif dan jarak terdekat dengan solusi ideal negatif. Hasil peringkat menggunakan Fuzzy TOPSIS ditunjukkan pada Tabel 4.8 dibawah ini.

Tabel 4.8 Hasil Peringkat dengan Fuzzy TOPSIS

Peringkat	Desa	Nilai Preferensi (<i>Closeness Coefficient</i>)
1	WUN10	0,9673
2	DOL3	0,9582

Peringkat	Desa	Nilai Preferensi (Closeness Coefficient)
3	DOL6	0,9407
4	MAD10	0,9407
5	WON7	0,9136
6	GEG4	0,9130
7	GEG11	0,9080
8	KEB8	0,9079
9	DAG9	0,9051
10	PIL12	0,8994
⋮	⋮	⋮
189	WUN4	0,5473
190	BAL8	0,5470
191	WUN11	0,5272
192	GEG17	0,5243
193	DAG2	0,5181
194	MAD1	0,5088
195	BAL5	0,4644
196	MEJ4	0,4569
197	SAR9	0,4406
198	WUN7	0,4336

Alternatif terbaik yaitu desa WUN10 dengan nilai preferensi sebesar 0,9673 dan alternatif terburuk yaitu desa WUN7 dengan nilai preferensi sebesar 0,4336.

4.2.4 Hasil Klasifikasi Fuzzy TOPSIS

Berdasarkan nilai preferensi pada Tabel 4.8 telah didapatkan peringkat 1 hingga 198 untuk semua desa di Kabupaten Madiun. Selanjutnya dilakukan pemetaan desa berdasarkan nilai preferensinya menjadi 4 kelompok seperti pada Tabel 4.9 dan Tabel 4.10 di bawah ini.

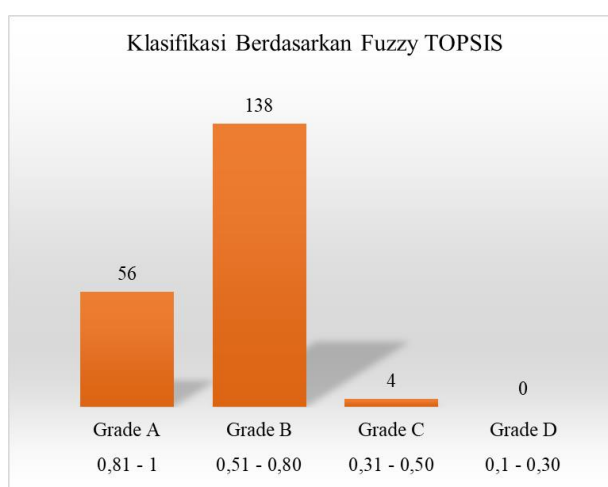
Tabel 4.9 Klasifikasi berdasarkan pengolahan Fuzzy TOPSIS

Kelompok	Nilai Preferensi (Closeness Coefficient)
Grade A (Sangat Baik)	0,81 – 1
Grade B (Baik)	0,51 – 0,80
Grade C (Cukup)	0,31 – 0,50
Grade D (Kurang)	0,1 – 0,30

Tabel 4.10 Hasil Klasifikasi Fuzzy TOPSIS

No.	Desa	Klasifikasi Fuzzy TOPSIS
1	BAL1	Grade B
2	BAL2	Grade B
3	BAL3	Grade B
4	BAL4	Grade B
5	BAL5	Grade C
6	BAL6	Grade B
7	BAL7	Grade B
8	BAL8	Grade B
9	BAL9	Grade B
10	BAL10	Grade B
⋮	⋮	⋮
189	WUN3	Grade B
190	WUN4	Grade B
191	WUN5	Grade B
192	WUN6	Grade B
193	WUN7	Grade C
194	WUN8	Grade A
195	WUN9	Grade B
196	WUN10	Grade A
197	WUN11	Grade B
198	WUN12	Grade B

Pemetaan di atas digunakan untuk melihat jumlah desa yang masuk ke dalam masing-masing kelompok dan untuk melihat karakteristik kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Jumlah masing – masing kelompok dirincikan pada Gambar 4.1 di bawah ini.



Gambar 4.1 Klasifikasi Berdasarkan Fuzzy TOPSIS

Hasil pemetaan berdasarkan metode Fuzzy TOPSIS seperti pada Gambar 4.1 menunjukkan bahwa desa yang masuk dalam Grade A dengan nilai preferensi 0,81 – 1 yaitu sebanyak 56 desa, desa yang masuk dalam Grade B dengan nilai preferensi 0,51 – 0,80 sebanyak 138 desa dan 4 desa sisanya masuk ke dalam Grade C dengan nilai preferensi 0,31 – 0,50.

4.3 Hasil Penilaian dengan Skor Manual

4.3.1 Hasil Skor Manual

Hasil perangkingan menggunakan Fuzzy TOPSIS memerlukan data pendukung yang digunakan sebagai validator. Perbandingan hasil perangkingan Fuzzy TOPSIS dan data validator dimaksud akan menghasilkan akurasi terhadap pemetaan kelompok desa. Validator penelitian ini didapatkan dari penilaian skor manual. Pada kuesioner terdapat 5 kategori jawaban di setiap pertanyaan seperti dijelaskan pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11 Skor Jawaban Kuesioner

Jawaban		Jumlah Pertanyaan	Skor 3 = (1*2)
1		2	3
1	Sangat Kurang	74	74
2	Kurang		148
3	Cukup		222
4	Baik		296
5	Sangat Baik		370

Penghitungan skor manual pada Tabel 4.11 didapatkan dari perkalian skor jawaban setiap pertanyaan dengan jumlah total pertanyaan sebanyak 74 pertanyaan. Hasil skor untuk masing – masing desa dirincikan pada Tabel 4.12 di bawah ini.

Tabel 4.12 Hasil Skor Manual

No.	Desa	Skor Manual
1	BAL1	276
2	BAL2	291
3	BAL3	269

No.	Desa	Skor Manual
4	BAL4	283
5	BAL5	244
6	BAL6	286
7	BAL7	300
8	BAL8	271
9	BAL9	278
10	BAL10	287
⋮	⋮	⋮
189	WUN3	272
190	WUN4	263
191	WUN5	291
192	WUN6	292
193	WUN7	251
194	WUN8	303
195	WUN9	290
196	WUN10	323
197	WUN11	278
198	WUN12	293

4.3.2 Hasil Klasifikasi Skor Manual

Berdasarkan skor manual pada setiap desa, selanjutnya dilakukan pemetaan desa menjadi 4 kelompok seperti pada Tabel 4.13 dan Tabel 4.14 di bawah ini.

Tabel 4.13 Klasifikasi Berdasarkan Skor Manual

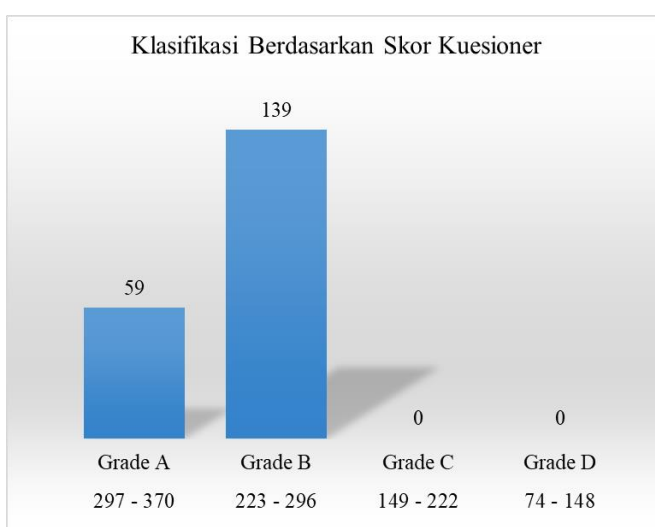
Kelompok	Skor
Grade A (Sangat Baik)	297 – 370
Grade B (Baik)	223 – 296
Grade C (Cukup)	149 – 222
Grade D (Kurang)	74 – 148

Tabel 4.14 Hasil Klasifikasi Berdasarkan Skor Manual

No.	Desa	Klasifikasi Skor Kuesioner
1	BAL1	Grade B
2	BAL2	Grade B
3	BAL3	Grade B
4	BAL4	Grade B
5	BAL5	Grade B

No.	Desa	Klasifikasi Skor Kuesioner
6	BAL6	Grade B
7	BAL7	Grade A
8	BAL8	Grade B
9	BAL9	Grade B
10	BAL10	Grade B
⋮	⋮	⋮
189	WUN3	Grade B
190	WUN4	Grade B
191	WUN5	Grade B
192	WUN6	Grade B
193	WUN7	Grade B
194	WUN8	Grade A
195	WUN9	Grade B
196	WUN10	Grade A
197	WUN11	Grade B
198	WUN12	Grade B

Pemetaan di atas digunakan untuk melihat jumlah desa yang masuk ke dalam masing-masing kelompok dan untuk melihat karakteristik kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan skor manual. Jumlah masing – masing kelompok dirincikan pada Gambar 4.2 di bawah ini.

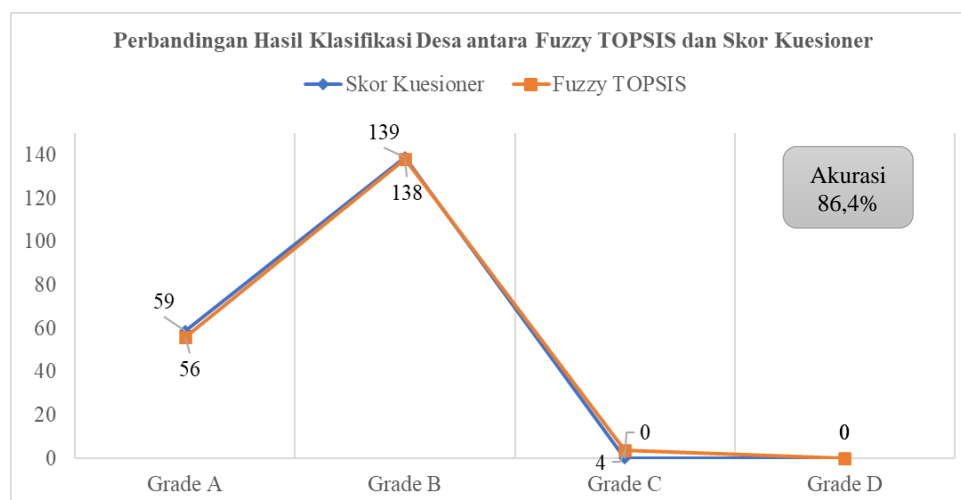


Gambar 4.2 Klasifikasi Berdasarkan Skor Manual

Hasil pemetaan desa berdasarkan skor manual dapat diketahui dari Gambar 4.2 di atas, yaitu terdapat 59 desa yang masuk ke dalam Grade A dengan skor 297 – 370 dan sisanya masuk ke dalam Grade B sebanyak 139 desa dengan skor 223 – 296.

4.4 Akurasi Klasifikasi antara Fuzzy TOPSIS dengan Skor Manual

Hasil klasifikasi desa menggunakan Fuzzy TOPSIS memerlukan data pembandingan sebagai validator untuk didapatkan akurasi klasifikasinya. Pada penelitian ini, validasi akan dilakukan menggunakan data hasil skor manual pada setiap desa yang telah diklasifikasikan berdasarkan skor total pertanyaan kuesioner. Hasil akurasi didapatkan sebesar 86,4% seperti pada Gambar 4.3 di bawah ini.



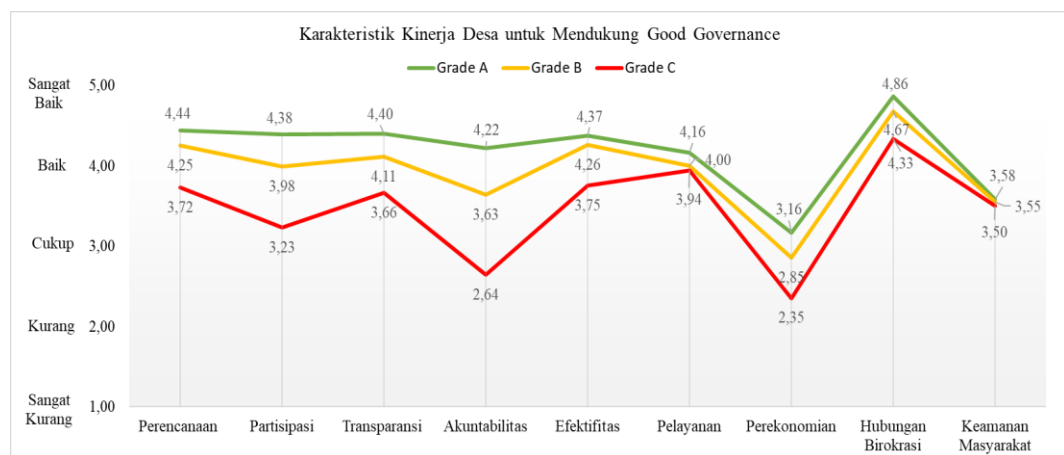
Gambar 4.3 Akurasi Klasifikasi Fuzzy TOPSIS dengan Skor Manual

4.5 Karakteristik Kinerja Desa

4.5.1 Karakteristik Kinerja Desa Berdasarkan Prinsip - prinsip *Good Governance Framework*

Good Governance merupakan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai pelaksanaan pembangunan yang solid dan pengelolaan yang bertanggung jawab. Tata kelola pemerintahan yang baik harus berpijak pada prinsip – prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya, diantaranya perencanaan, partisipasi, transparansi,

akuntabilitas, efektifitas, pelayanan, perekonomian, hubungan birokrasi dan keamanan masyarakat. Dalam implementasinya, pemerintah harus dapat menjadi pelayan masyarakat yang responsif, adaptif, bermartabat, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tegas dalam penegakan hukum, partisipatif dan memprioritaskan keterbukaan informasi kepada publik. Sehingga tujuan akhir dari pemerintahan yaitu kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.



Gambar 4.4 Karakteristik Kinerja Desa Berdasarkan Prinsip – prinsip *Good Governance Framework*

Berdasarkan karakteristik kinerja yang berpijak pada prinsip – prinsip *Good Governance Framework*, desa di Kabupaten Madiun dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok sebagaimana dijelaskan pada Gambar 4.4, yaitu Grade A (Sangat Baik), Grade B (Baik) dan Grade C (Cukup). Terdapat 56 desa yang masuk ke dalam Grade A, di mana kelompok ini memiliki karakteristik kinerja yang mendekati kategori sangat baik dalam melaksanakan tata kelola pemerintahannya. Hal ini ditunjukkan bahwa 7 prinsip *Good Governance* telah diimplementasikan secara baik dengan nilai di atas 4,00, yaitu Perencanaan, Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas, Efektifitas, Pelayanan, dan Hubungan Birokrasi. Sedangkan 2 prinsip berada pada kondisi cukup dengan nilai di bawah 4,00, yaitu Perekonomian dan Keamanan Masyarakat.

Pada Grade B atau kelompok tengah terdapat 138 desa. Kelompok ini telah mengimplementasikan secara baik 5 prinsip *Good Governance*, diantaranya Perencanaan, Transparansi, Efektifitas, Pelayanan dan Hubungan birokrasi. Kelima prinsip tersebut berada pada nilai rata-rata di atas 4,00. Sedangkan 3 prinsip lainnya, yaitu Partisipasi, Akuntabilitas dan Pelayanan berada pada nilai rata-rata cukup dan satu sisanya yaitu prinsip Perekonomian berada pada kondisi kurang dengan nilai 2,85.

Kelompok terburuk yaitu Grade C terdapat 4 desa di mana hanya 1 prinsip *Good Governance* yang telah diimplementasikan secara baik, yaitu Hubungan Birokrasi. Sedangkan 6 prinsip diimplementasikan dalam kondisi cukup, yaitu Perencanaan, Partisipasi, Transparansi, Efektifitas, Pelayanan dan Keamanan Masyarakat. Dua prinsip diimplementasikan dalam kondisi kurang yaitu Akuntabilitas dan Perekonomian.

Secara keseluruhan, prinsip – prinsip *Good Governance* telah dapat diimplementasikan di pemerintahan desa Kabupaten Madiun. Tetapi, pada sebagian besar desa, yaitu pada Grade B dan Grade C perlu ditingkatkan dan dikawal untuk akselerasi perwujudan *Good Governance*. Secara makro, dapat diketahui bahwa terdapat empat prinsip yang masih sangat perlu ditingkatkan di pemerintahan desa Kabupaten Madiun, yaitu Partisipasi, Akuntabilitas, Perekonomian dan Keamanan Masyarakat. Pemerintah Daerah perlu menyusun strategi maupun kebijakan dalam rangka optimalisasi implementasi empat prinsip tersebut untuk akselerasi perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Madiun. Sedangkan lima prinsip lainnya yaitu, Perencanaan, Transparansi, Efektifitas, Pelayanan dan Hubungan Birokrasi sudah dapat diimplementasikan dengan baik. Tetapi, tetap perlu strategi untuk mempertahankan maupun meningkatkan lagi dari pemerintah daerah maupun pemerintah desa untuk mendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Madiun.

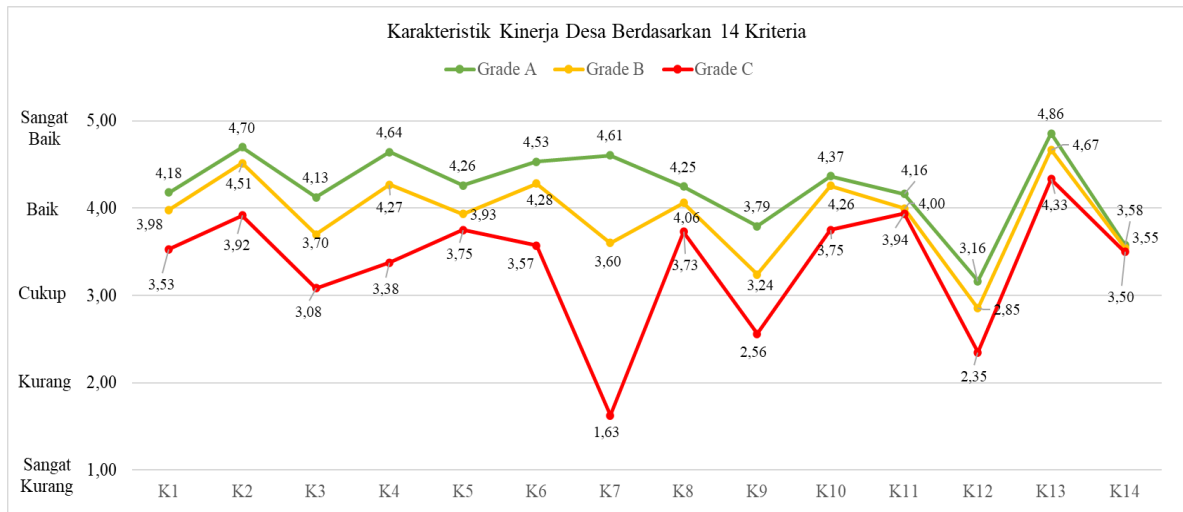
4.5.2 Karakteristik Kinerja Desa Berdasarkan 14 Kriteria *Good Governance Framework*

Kriteria pada penelitian ini didasarkan pada kerangka kerja *Good Governance* yang memiliki 9 prinsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan 9 prinsip tersebut, dirincikan menjadi 14 kriteria tata kelola pemerintahan desa yang baik dan didefinisikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).
2. Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
3. Partisipasi dan keaktifan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan masyarakat.
4. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan regulasi di desa.
5. Transparansi penyelenggaraan pemerintah desa.
6. Transparansi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
7. Pengawasan dan Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
8. Akuntabilitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
9. Inventarisasi, pengelolaan dan pelaporan aset desa.
10. Efektifitas penggunaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
11. Respon dan penyelesaian pelayanan kepada masyarakat.
12. Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan perbaikan perekonomian masyarakat.
13. Komunikasi dan koordinasi pemerintah desa dengan instansi di atasnya.
14. Keamanan masyarakat dari aspek sosial dan lingkungan.

Hasil klasifikasi Fuzzy TOPSIS menunjukkan bahwa desa di Kabupaten Madiun dapat dikelompokkan menjadi 3 tingkatan berdasarkan kinerja dalam tata kelola pemerintahannya. Klasifikasi 3

kelompok desa berdasarkan 14 kriteria *Good Governance Framework* digambarkan pada Gambar 4.5.



Gambar 4.5 Karakteristik Kinerja Desa Berdasarkan 14 Kriteria *Good Governance Framework*

Pada Gambar 4.5 ditunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada karakteristik kinerja desa berdasarkan 14 kriteria *Good Governance*. Pada Grade A terdapat 56 desa, ditunjukkan dari 14 kriteria, terdapat 11 kriteria berada pada nilai rata-rata di atas 4,00 yang artinya mendekati kaategori sangat baik, yaitu Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Partisipasi dan keaktifan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan masyarakat, Partisipasi masyarakat dalam penyusunan regulasi di desa, Transparansi penyelenggaraan pemerintah desa, Transparansi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Pengawasan dan Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah, dan Akuntabilitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sedangkan 3 kriteria berada pada nilai rata-rata di bawah 4,00 yang artinya cukup, yaitu Inventarisasi, pengelolaan dan pelaporan aset desa, Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan perbaikan perekonomian

masyarakat, dan Keamanan masyarakat dari aspek sosial dan lingkungan.

Pada kelompok tengah atau Grade B terdapat 138 desa. Dapat diketahui dari Gambar 4.5 bahwa 7 kriteria berada pada nilai rata-rata di atas 4,00 yang artinya telah diimplementasikan dengan baik, yaitu Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Partisipasi masyarakat dalam penyusunan regulasi di desa, Transparansi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Akuntabilitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Efektifitas penggunaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Respon dan penyelesaian pelayanan kepada masyarakat, dan Komunikasi dan koordinasi pemerintah desa dengan instansi di atasnya. Sedangkan 6 kriteria terdapat pada posisi nilai rata-rata di bawah 4,00 yang artinya cukup, yaitu Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Partisipasi dan keaktifan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan masyarakat, Transparansi penyelenggaraan pemerintah desa, Pengawasan dan Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Inventarisasi, pengelolaan dan pelaporan aset desa, dan Keamanan masyarakat dari aspek sosial dan lingkungan. Sisanya terdapat 1 kriteria yaitu Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan perbaikan perekonomian masyarakat yang berada pada nilai 2,85 yang artinya masih kurang baik dalam implementasinya.

Kelompok terbawah yaitu Grade C merupakan kelompok dengan nilai preferensi terendah dari 198 desa. Terdapat 4 desa yang masuk ke dalam kelompok ini. Berdasarkan 14 kriteria pada Gambar 4.5 dapat diketahui bahwa hanya satu kriteria yang berada pada nilai rata-rata di atas 4,00 yaitu Komunikasi dan koordinasi pemerintah desa dengan instansi di atasnya dengan nilai rata-rata 4,33. Sedangkan 10

kriteria berada pada nilai rata-rata di bawah 4,00 yang artinya cukup, yaitu Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Partisipasi dan keaktifan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan masyarakat, Partisipasi masyarakat dalam penyusunan regulasi di desa, Transparansi penyelenggaraan pemerintah desa, Transparansi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Akuntabilitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Efektifitas penggunaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Respon dan penyelesaian pelayanan kepada masyarakat, dan Keamanan masyarakat dari aspek sosial dan lingkungan. Sisanya terdapat 3 kriteria dengan nilai di bawah 3,00 yang artinya kurang, yaitu Pengawasan dan Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Inventarisasi, pengelolaan dan pelaporan aset desa, dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan perbaikan perekonomian masyarakat.

Secara makro dijelaskan pada Gambar 4.5, bahwa semua desa di Kabupaten Madiun berada pada kondisi yang mendekati sangat baik pada kriteria 13 yaitu, Komunikasi dan koordinasi pemerintah desa dengan instansi di atasnya. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pemerintah desa untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya selalu sejalan dengan arahan dari instansi di atasnya. Sedangkan kondisi terburuk untuk desa di Kabupaten Madiun di mana nilai rata-rata sebagian besar berada di bawah 3,00 yang artinya kurang baik yaitu pada kriteria 12. Kriteria 12 terkait dengan perekonomian di masyarakat desa. Hal ini dilihat dari peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) hingga dampak untuk perbaikan perekonomian masyarakat di desa. Berdasarkan kriteria ini dapat diketahui bahwa sebagian besar desa di Kabupaten Madiun masih belum bisa berdaya secara mandiri untuk menggerakkan perekonomian dan menghasilkan

Pendapatan Asli Desa (PADes) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Karakter ini menunjukkan bahwa desa di Kabupaten Madiun masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah untuk menggerakkan perekonomiannya.

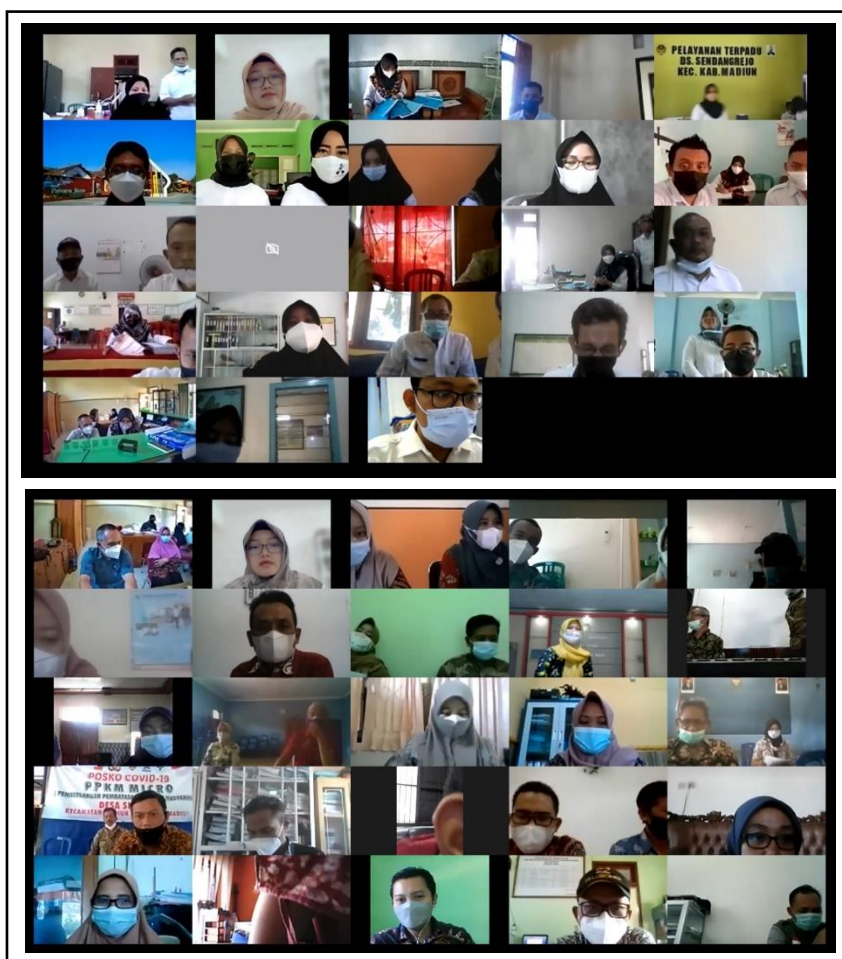
4.6 Tantangan dan Permasalahan Pemerintah Desa

Karakteristik kinerja desa di Kabupaten Madiun telah teridentifikasi pada pembahasan sebelumnya. Secara makro dapat diketahui bahwa kriteria terbaik yang sudah diimplementasikan oleh seluruh desa adalah hubungan birokrasi desa dengan instansi di atasnya. Kriteria ini dapat terimplementasi sangat baik karena sebagian besar kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah desa bersifat “top down”, artinya kebijakan yang dijalankan oleh seluruh unit pelaksana merupakan kebijakan yang dirumuskan dan diputuskan oleh jajaran instansi atas. Sehingga aliran kebijakan bersifat dari atas ke bawah dalam pelaksanaannya. Meskipun demikian, kebijakan yang bersifat “bottom up” tetap diperlukan sebagai salah satu cara menggali aspirasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan negara.

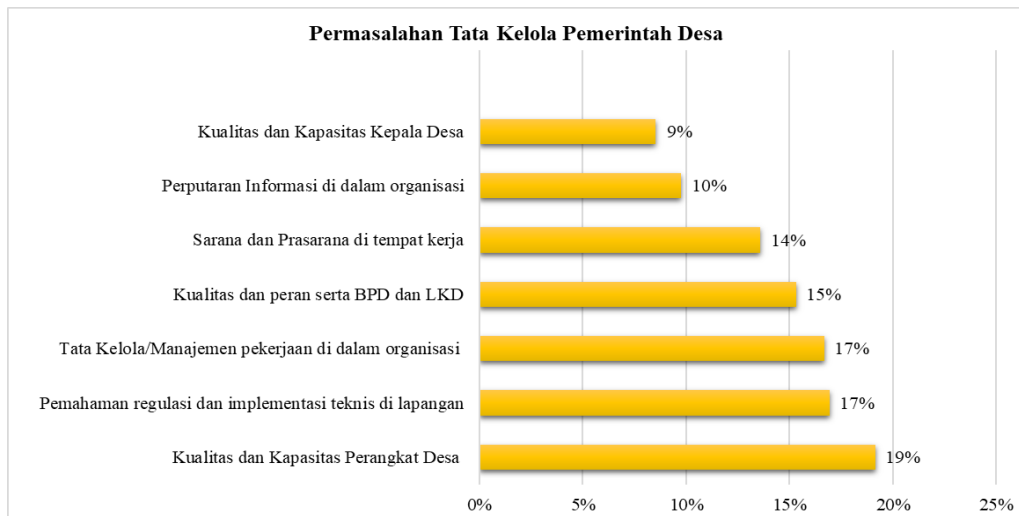
Kriteria terburuk pada kinerja desa di Kabupaten Madiun yaitu aspek perekonomian. Hal ini mencakup tentang proses peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) hingga dampak positifnya terhadap perekonomian masyarakat. Dapat diketahui pada pembahasan sebelumnya, bahwa dari seluruh desa belum menunjukkan peningkatan PADes yang signifikan hingga tahun 2020. Sehingga perekonomian masyarakat desa di Kabupaten Madiun juga belum bisa meningkat secara signifikan hingga saat ini. Hal ini merupakan salah satu tantangan desa yang bersifat multi dimensional karena dapat memberikan dampak buruk ke banyak aspek pemerintahan, misalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sulit untuk ditingkatkan jika akar terbawah dari desa tidak memberikan kontribusi yang signifikan, Pemerintah Desa selalu mengandalkan kucuran dana dari APBN maupun APBD yang mengakibatkan kemandirian ekonomi semakin lemah, potensi korupsi

semakin terbuka lebar karena Pemerintah Desa merasa tidak mengeluarkan usaha lebih untuk mendapatkan anggaran yang dikelola setiap tahun, dan lain sebagainya.

Terdapat banyak aspek yang menjadi faktor buruknya kinerja pemerintah desa, mulai dari faktor Sumber Daya Manusia (SDM), Infrastruktur dan Teknologi, dan Regulasi. Berdasarkan survey ke seluruh desa di Kabupaten Madiun, permasalahan yang muncul dan aspek – aspek yang harus diperbaiki dalam pemerintahan desa dikelompokkan menjadi 7 sebagaimana Gambar 4.6, yaitu :



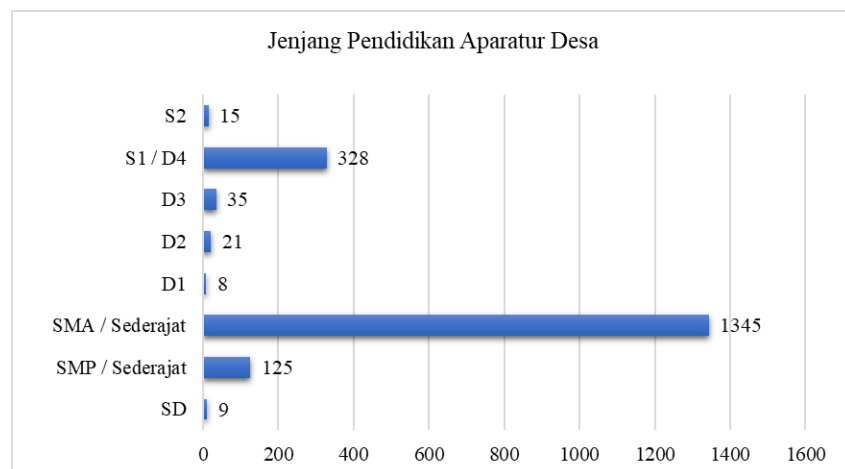
Gambar 4.6 Survey secara online kepada 198 desa



Gambar 4.7 Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Desa

1. Kualitas dan Kapasitas Perangkat Desa

Faktor mendasar yang menjadi kunci utama kualitas pada suatu pekerjaan adalah SDM. Kualitas dan kapasitas perangkat desa merupakan pondasi utama dalam roda pemerintahan desa. Aparatur desa dituntut memiliki kemampuan dasar, kemampuan manajerial, dan kemampuan teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemerintahan desa. Berdasarkan Gambar 4.7, permasalahan kualitas dan kapasitas perangkat desa menduduki urutan pertama, yaitu sebesar 19%. Hal ini menunjukkan bahwa akar masalah utama yang dihadapi seluruh desa adalah kualitas SDM. Jika dilihat dari jenjang pendidikan, aparatur desa di Kabupaten Madiun sebagian besar adalah lulusan SMA yaitu sebanyak 1.345 orang sebagaimana pada Gambar 4.8.



Gambar 4.8 Jenjang Pendidikan Aparatur Desa

Hal ini berarti 71% Pemerintah Desa di Kabupaten Madiun ditangani oleh lulusan SMA. Sedangkan lulusan D3 dan S1/D4 yang idealnya menjadi spesifikasi minimal orang untuk bekerja di dunia pemerintahan hanya 19%. Kualitas SDM inilah yang menjadi salah satu faktor utama terjadinya berbagai macam masalah di desa. Tuntutan pekerjaan yang semakin berat dan cepat, diperlukan kapabilitas dan kemampuan manajerial maupun teknis untuk SDM di setiap organisasi. Selain itu organisasi juga harus menyiapkan SDM untuk kebutuhan digitalisasi dalam birokrasi supaya dapat meningkatkan efektifitas dan transparansi dalam pekerjaan. Sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang akan muncul di desa.

2. Pemahaman regulasi dan implementasi teknis di lapangan

Regulasi merupakan pedoman atau pijakan utama dalam pekerjaan di bidang pemerintahan, karena dari regulasi akan diturunkan proses bisnis yang akan menjadi petunjuk teknis pekerjaan di setiap organisasi. Sehingga diperlukan pemahaman yang baik supaya dapat mengimplementasikan program dengan baik dan sesuai dengan target. Kurangnya pemahaman regulasi menimbulkan permasalahan maupun kegagalan pekerjaan di pemerintahan. Hal ini ditunjukkan pada Gambar 4.7, bahwa 17% permasalahan di desa muncul akibat kurang baiknya aparatur desa dalam memahami regulasi dan berdampak pada implementasi teknis di lapangan yang kurang baik.

3. Tata Kelola/Manajemen pekerjaan di dalam organisasi

Manajemen pekerjaan di dalam organisasi idealnya dimulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Perbaikan (PPEPP). Urutan ini memberikan pedoman kepada organisasi untuk dapat meminimalisir kegagalan dan meningkatkan keberhasilan pekerjaan. Tetapi tidak sedikit organisasi yang belum bisa menjalankan manajemen pekerjaan secara urut, bahkan ada fase yang tidak dilaksanakan, misalnya evaluasi dan perbaikan. Faktor ini juga menduduki angka yang cukup besar yaitu 17% sebagai salah satu aspek yang menyebabkan permasalahan muncul di desa. Tata kelola yang

tidak urut atau bahkan tidak dikerjakan secara lengkap mengakibatkan permasalahan selalu muncul secara berulang setiap tahunnya.

4. Kualitas dan peran serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai parlemen di desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. LKD merupakan wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Peran BPD dan LKD terhadap roda pemerintahan desa sangat penting, karena sebagai jembatan utama antara Pemerintah Desa dengan masyarakat. Kurang aktifnya BPD dan LKD juga merupakan faktor penyebab timbulnya masalah yang ada di desa. Karena fungsi mereka sebagai jembatan komunikasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat tidak berjalan dengan baik. Sehingga aspirasi masyarakat tidak dapat tersampaikan secara lengkap kepada Pemerintah Desa dan akibatnya program Pemerintah Desa tidak dapat tepat sasaran. Hal ini ditunjukkan di Kabupaten Madiun bahwa faktor peran serta BPD dan LKD menduduki 15% dari faktor penyebab masalah yang ada di desa.

Setiap akhir tahun anggaran, Pemerintah Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat berupa laporan yang diserahkan kepada BPD sebagaimana Gambar 4.9, serta melalui media publikasi baik cetak maupun elektronik yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat sebagai bukti transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa sebagaimana Gambar 4.10.



Gambar 4.9 Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada BPD



Gambar 4.10 Publikasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes

5. Sarana dan Prasarana di tempat kerja

Kenyamanan dalam bekerja salah satunya berasal dari lengkap tidaknya sarana dan prasarana di tempat kerja. Dapat diketahui bahwa penataan desa di

Indonesia merupakan hal yang relatif baru, yaitu dimulai pada tahun 2014. Banyak desa yang belum memiliki kantor desa dengan sarana dan prasana yang memadai. Terlebih pada daerah terpencil dan tertinggal. Di Kabupaten Madiun faktor sarana dan prasarana kantor desa merupakan faktor yang cukup mendominasi, yaitu sebesar 14%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian khusus terhadap percepatan perbaikan infrastruktur kantor desa beserta sarana dan prasarananya.



Gambar 4.11 Kondisi sarana dan prasarana kantor desa

6. Perputaran Informasi (*Knowledge Management*) di dalam organisasi

Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai sebuah informasi yang bersifat tacit maupun eksplisit, yang dapat diingat dan digunakan oleh individu untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik dan untuk membuat keputusan yang tepat. Pengetahuan bersifat tacit adalah pengetahuan yang tersimpan di dalam pikiran seseorang yang diperoleh dari akumulasi pengalaman dalam banyak kasus atau permasalahan yang membuat seseorang memiliki nilai atau kesan

tersendiri dan tidak mudah untuk disebarluaskan kepada orang lain. Sedangkan pengetahuan yang bersifat eksplisit adalah pengetahuan yang terdokumentasi dengan baik dan mudah untuk disebarluaskan kepada orang lain.

Mengelola pengetahuan di sebuah organisasi merupakan tugas yang sangat menantang, karena organisasi dapat menangkap, mengatur, dan mengelola sumber daya pengetahuan yang sangat besar untuk dijadikan sumber pengambilan keputusan. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah pendekatan untuk mengelola pengetahuan secara sistematis yang bertujuan untuk menggali secara optimal pengetahuan di ranah internal, menyebarluaskan kepada elemen-elemen yang andil dalam pemerintahan dan dikolaborasikan dengan keahlian, keterampilan, inovasi, ide, pemikiran dari masing-masing individu maupun tim dalam bekerja. Hal inilah yang disebut *Knowledge Management*.

Manajemen pengetahuan yang baik dalam organisasi dapat menghasilkan perputaran informasi yang baik dan merata di internal organisasi. Hal ini dapat meminimalisir adanya perselisihan atau missed communication di organisasi yang dapat mengakibatkan munculnya permasalahan. Faktor ini masih menjadi penyebab terjadinya permasalahan yang muncul di desa yaitu sebesar 10%. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen pengetahuan dan informasi di dalam pemerintah desa harus diperbaiki supaya tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar.

7. Kualitas dan Kapasitas Kepala Desa

Pemimpin merupakan ujung pengambil keputusan di setiap organisasi. Diperlukan upaya kepemimpinan yang baik dan sungguh-sungguh untuk dapat memastikan instansi mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik yang di evaluasi secara berkelanjutan. Kepala desa merupakan pejabat public yang dipilih melalui Pilihan Kepala Desa (Pilkades) setiap 6 tahun sekali. Artinya setiap kepala desa terpilih memiliki visi, misi, dan gaya kepemimpinan masing – masing. Untuk dapat merealisasikan visi dan misi tersebut, kepala desa dituntut memiliki kemampuan dasar, kemampuan manajerial, dan kemampuan teknis dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kualitas kepala desa menjadi faktor penting keberhasilan penyelenggaraan

pemerintahan di suatu desa. Hal ini terbukti bahwa masih terdapat andil sebesar 9% di Kabupaten Madiun bahwa kualitas dan kapasitas kepala desa merupakan salah satu faktor penyebab permasalahan yang muncul di desa.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan, didapatkan kesimpulan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Analisis pengambilan keputusan untuk memilih desa berkinerja terbaik dari 198 desa di Kabupaten Madiun, berdasarkan *Good Governance Framework* dengan 14 kriteria dapat menggunakan metode Fuzzy TOPSIS dan didapatkan hasil desa terbaik dengan nilai preferensi (*Closeness Coefficient*) sebesar 0,9673 yaitu desa WUN10.
2. Hasil pemeringkatan menggunakan Fuzzy TOPSIS berdasarkan nilai preferensi (*Closeness Coefficient*) dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok desa, yaitu Grade A (Sangat Baik) dengan nilai preferensi 0,81 – 1,00 sebanyak 56 desa, Grade B (Baik) dengan nilai preferensi 0,51 – 0,80 sebanyak 138 desa, Grade C (Cukup) dengan nilai preferensi 0,31 – 0,50 sebanyak 4 desa dan tidak ada desa yang masuk dalam Grade D (Kurang) dengan nilai preferensi 0,01 – 0,30.
3. Hasil klasifikasi desa menggunakan Fuzzy TOPSIS dibandingkan dengan data validator. Data validator pada penelitian ini yaitu skor manual yang didapatkan dari skor total pertanyaan kuesioner pada setiap desa. Perbandingan klasifikasi ini digunakan untuk menghitung tingkat akurasi. Hasil akurasi klasifikasi didapatkan sebesar 86,4%.
4. Prinsip – prinsip Good Governance telah dapat diimplementasikan di pemerintahan desa Kabupaten Madiun. Tetapi, pada sebagian besar desa, yaitu pada Grade B dan Grade C perlu ditingkatkan dan dikawal untuk akselerasi perwujudan Good Governance. Secara makro, dapat diketahui bahwa terdapat empat prinsip yang masih sangat perlu ditingkatkan di pemerintahan desa Kabupaten Madiun, yaitu partisipasi, akuntabilitas, perekonomian dan keamanan masyarakat. Sedangkan lima prinsip

lainnya yaitu, perencanaan, transparansi, efektifitas, pelayanan dan hubungan birokrasi sudah dapat diimplementasikan dengan baik.

5. Secara makro diketahui bahwa semua desa di Kabupaten Madiun berada pada kondisi yang mendekati sangat baik pada kriteria 13 yaitu, komunikasi dan koordinasi pemerintah desa dengan instansi di atasnya. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pemerintah desa untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya selalu sejalan dengan arahan dari instansi di atasnya. Sedangkan kondisi terburuk untuk desa di Kabupaten Madiun di mana nilai rata-rata sebagian besar berada di bawah 3,00 yang artinya kurang yaitu pada kriteria 12, yaitu terkait dengan perekonomian di masyarakat desa. Berdasarkan kriteria ini dapat diketahui bahwa sebagian besar desa di Kabupaten Madiun masih belum bisa berdaya secara mandiri untuk menggerakkan perekonomian dan menghasilkan pendapatan asli desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Karakter ini menunjukkan bahwa desa di Kabupaten Madiun masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah, baik dari pusat, provinsi maupun daerah untuk menggerakkan ekonominya.
6. Tantangan dan permasalahan Pemerintah Desa di Kabupaten Madiun dapat dikelompokkan menjadi 7 aspek, yaitu Kuaitas dan kapasitas perangkat desa sebesar 19%, Pemahaman regulasi dan implementasi teknis di lapangan sebesar 17%, Tata kelola / manajemen pekerjaan di dalam organisasi sebesar 17%, Kualitas dan peran serta BPD dan LKD sebesar 15%, Sarana dan prasarana di tempat kerja sebesar 14%, Perputaran informasi (*Knowledge Management*) di dalam organisasi sebesar 10%, dan Kualitas dan kapasitas kepala desa sebesar 9%.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat saran untuk pemerintah Kabupaten Madiun dan untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

1. Hasil analisis untuk karakteristik kinerja desa dapat menjadi bahan referensi atau pertimbangan dalam penyusunan kebijakan untuk perbaikan kondisi pemerintahan desa di Kabupaten Madiun.

2. Tingkat akurasi dari hasil penelitian dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sinkronisasi pertanyaan dan jawaban di kuesioner yang bersifat ambigu / kurang jelas, perlunya pembuktian atau validasi hasil survey terhadap kondisi di lapangan, dan perlunya data sekunder menjadi data dukung serta bukti hasil survey.
3. Pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan metode *Dimensional Reduction* sebelum data diolah menggunakan metode Multi Criteria Decision Making (MCDM) supaya didapatkan tingkat akurasi yang lebih baik. Hal ini dikarenakan kasus dan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar bersifat tidak eksak / ambigu, sehingga menimbulkan keragu – raguan di setiap jawaban responden. Metode *Dimensional Reduction* yang dapat digunakan, misalnya Principal Component Analysis (PCA), Singular Value Decomposition (SVD), Linear Discriminant Analysis (LDA) dan lain sebagainya.
4. Penelitian ini dibatasi pada 9 prinsip Good Governance dan 14 kriteria berdasarkan *Good Governance Framework* menggunakan metode Fuzzy TOPSIS. Pada penelitian selanjutnya dapat dijabarkan lagi secara detail kriteria – kriteria terkait tata kelola pemerintahan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah, baik untuk pemerintah skala lokal maupun pusat menggunakan metode Multi Criteria Decision Making (MCDM) selain Fuzzy TOPSIS untuk didapatkan akurasi yang lebih tinggi.

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Evangelos Triantaphyllou. *Multi-Criteria Decision Making Methods: A Comparative Study*. Department of Industrial and Manufacturing Systems Engineering, College of Engineering, Louisiana State University. ISBN 978-1-4757-3157-6. DOI 10.1007/978-1-4757-3157-6, 2000.
- [2] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.
- [3] Gwo-Hshiung Tzeng dan Jih-Jeng Huang. *Multiple Attribute Decision Making Methods and Applications*. CRC Press Taylor & Francis Group 6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300 Boca Raton, FL 33487-2742, 2011.
- [4] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- [5] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- [6] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.
- [7] Charles G. Kamau dan Humam Bin Mohamed. *Efficacy of Monitoring and Evaluation Function in Achieving Project Success in Kenya: A Conceptual 18 Framework*. Science Journal of Business and Management. Vol. 3, No. 3, 2015, pp. 82-94. doi: 10.11648/j.sjbm.20150303.14, 2015.
- [8] Sorin Nadaban, Simona Dzitac dan Ioan Dzitac. *Fuzzy TOPSIS: A General View*. Procedia Computer Science 91 (2016) 823 – 831. Information Technology and Quantitative Management (ITQM 2016), 2016.
- [9] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.
- [10] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- [11] Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- [12] Jingjing Du dan Zhongwei Chen. *Applying Organizational Ambidexterity in Strategic Management under a "VUCA" Environment: Evidence from High Tech Companies in China*. International Journal of Innovation Studies, 2018.
- [13] Dyah Budiastuti dan Agustinus Bandur. *Validitas dan Reliabilitas Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media. ISBN: 978-602-318, 2018.

- [14] Emad Abu-Shanab dan Issa Shehabat. *The Influence of Knowledge Management Practices on E-Government Success: a Proposed Framework Tested*. Transforming Government: People, Process and Policy, 2018.
- [15] Manindra Rajak dan Krishnendu Shaw. *Evaluation and selection of mobile health (mHealth) applications using AHP and fuzzy TOPSIS*. Technology in Society, 2019.
- [16] Ralf Müller. *Governance, Governmentality and Project Performance: The Role of Sovereignty*. International Journal of Information Systems and Project Management, 2019.
- [17] Rathin B., Arnab J., Kavi A., Krithi R. *A Good Governance Framework For Urban Management*. Journal of Urban Management, 2019.
- [18] Mehrbakhsh Nilashi dkk. *Factors Influencing Medical Tourism Adoption in Malaysia: A DEMATEL Fuzzy TOPSIS Approach*. International Journal of Computer and Industrial Engineering, 2019.
- [19] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
- [20] Nova Rijati dkk. *Fuzzy Multi-Attribute Decision Making for Classification of Entrepreneurial Potential Based on Theory of Planned Behavior*. Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, 2020.
- [21] Ayu Tiara Suci dkk. *Metode Fuzzy TOPSIS Pada Pengambilan Keputusan Rekrutmen Karyawan PT. Erporate Solusi Global*. Jurnal Teknoin Vol. 26, No. 1, Maret 2020: 14-22.
- [22] Nova Rijati dkk. *A Decision Making and Clustering Method Integration based on the Theory of Planned Behavior for Student Entrepreneurial Potential Mapping in Indonesia*. International Journal of Intelligent Engineering and Systems, 2020.
- [23] Mohamed El Alaoui. *Fuzzy TOPSIS Logic, Approaches, and Case Studies*. CRC Press, Taylor and Francis Group, Boca Raton, London, New York, 2021.
- [24] Yanfang Niu. *Organizational Business Intelligence and Decision Making using Big Data Analytics*. Journal of Information Processing and Management, 2021
- [25] Wana Alamsyah. *Kinerja Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2020*. Artikel Indonesia Corruption Watch Article, 2021.

LAMPIRAN

Peringkat Desa Berdasarkan Nilai Preferensi Fuzzy TOPSIS

Peringkat	Desa	Nilai Preferensi	Peringkat	Desa	Nilai Preferensi
1	WUN10	0,9673	36	PIL5	0,8404
2	DOL3	0,9582	37	SAW5	0,8375
3	DOL6	0,9407	38	GEG13	0,8367
4	MAD10	0,9407	39	SAR13	0,8366
5	WON7	0,9136	40	PIL4	0,8347
6	GEG3	0,9130	41	WON1	0,8328
7	GEG11	0,9080	42	KEB11	0,8237
8	KEB8	0,9079	43	DAG4	0,8212
9	DAG9	0,9051	44	PIL14	0,8209
10	PIL12	0,8994	45	JIW13	0,8193
11	WUN8	0,8971	46	KAR4	0,8193
12	KEB3	0,8861	47	GEG8	0,8190
13	GEM4	0,8813	48	GEG7	0,8181
14	WON4	0,8813	49	MEJ6	0,8173
15	KEB7	0,8811	50	PIL7	0,8137
16	BAL17	0,8803	51	PIL8	0,8126
17	DAG6	0,8788	52	KEB5	0,8121
18	KEB10	0,8776	53	GEG2	0,8089
19	GEM1	0,8767	54	KAR5	0,8088
20	WON3	0,8739	55	GEG19	0,8087
21	PIL2	0,8739	56	GEG5	0,8078
22	SAW4	0,8737	57	GEG4	0,8073
23	DAG17	0,8717	58	MEJ8	0,8068
24	MAD11	0,8709	59	KEB9	0,8063
25	DOL7	0,8707	60	SAR1	0,8061
26	DOL5	0,8682	61	DOL8	0,8052
27	BAL13	0,8670	62	SAW10	0,7995
28	PIL17	0,8649	63	KEB4	0,7900
29	GEG9	0,8624	64	WON9	0,7887
30	PIL18	0,8501	65	WON6	0,7864
31	SAR14	0,8474	66	BAL10	0,7829
32	KEB6	0,8463	67	MAD8	0,7823
33	BAL18	0,8443	68	PIL9	0,7815
34	JIW14	0,8405	69	GEG16	0,7803
35	KEB13	0,8404	70	BAL7	0,7788

Peringkat	Desa	Nilai Preferensi	Peringkat	Desa	Nilai Preferensi
71	SAW13	0,7786	111	PIL11	0,7419
72	DAG15	0,7784	112	JIW3	0,7414
73	JIW11	0,7782	113	DOL9	0,7413
74	BAL4	0,7779	114	SAR8	0,7394
75	BAL15	0,7772	115	KAR7	0,7391
76	KEB1	0,7765	116	SAW9	0,7367
77	KEB2	0,7757	117	PIL16	0,7359
78	DAG11	0,7750	118	BAL12	0,7358
79	GEG1	0,7750	119	BAL6	0,7326
80	SAR11	0,7745	120	WON2	0,7320
81	SAR7	0,7744	121	JIW6	0,7291
82	MEJ11	0,7737	122	MEJ10	0,7258
83	GEG14	0,7736	123	SAW12	0,7244
84	SAR6	0,7721	124	PIL1	0,7240
85	WON10	0,7709	125	WUN9	0,7201
86	GEG6	0,7683	126	WUN6	0,7188
87	DAG16	0,7672	127	MAD7	0,7186
88	MAD6	0,7669	128	DOL1	0,7182
89	BAL14	0,7621	129	SAW11	0,7168
90	BAL2	0,7605	130	DOL2	0,7114
91	MAD4	0,7603	131	PIL15	0,7113
92	MAD12	0,7586	132	DAG3	0,7108
93	MAD2	0,7586	133	SAR12	0,7105
94	SAW3	0,7586	134	JIW1	0,7091
95	SAR10	0,7561	135	PIL10	0,7073
96	KAR3	0,7537	136	JIW4	0,7072
97	KEB12	0,7521	137	MAD9	0,6997
98	GEM5	0,7497	138	KEB14	0,6966
99	MEJ2	0,7495	139	JIW9	0,6953
100	DAG12	0,7484	140	BAL1	0,6879
101	GEM7	0,7480	141	WON8	0,6842
102	JIW5	0,7475	142	PIL6	0,6807
103	SAW6	0,7464	143	WUN5	0,6797
104	MEJ3	0,7463	144	DAG1	0,6787
105	WUN12	0,7460	145	GEG10	0,6784
106	KAR6	0,7454	146	SAW1	0,6783
107	DAG13	0,7447	147	BAL3	0,6772
108	GEM3	0,7443	148	BAL11	0,6772
109	JIW8	0,7429	149	SAW8	0,6770
110	KAR2	0,7427	150	GEG12	0,6732

Peringkat	Desa	Nilai Preferensi	Peringkat	Desa	Nilai Preferensi
151	JIW10	0,6713	175	MEJ1	0,6034
152	GEM2	0,6708	176	KAR1	0,6017
153	MEJ9	0,6686	177	GEG18	0,5979
154	SAW7	0,6624	178	JIW7	0,5956
155	BAL9	0,6601	179	WUN2	0,5881
156	KAR8	0,6555	180	JIW2	0,5770
157	SAR5	0,6553	181	DAG10	0,5759
158	BAL16	0,6551	182	MEJ7	0,5745
159	DOL4	0,6549	183	DOL10	0,5723
160	SAR2	0,6512	184	SAR15	0,5701
161	SAR3	0,6499	185	DAG5	0,5647
162	MAD3	0,6467	186	WUN1	0,5645
163	WON5	0,6452	187	MAD5	0,5556
164	GEM6	0,6445	188	SAW2	0,5531
165	PIL13	0,6433	189	WUN4	0,5473
166	DAG7	0,6404	190	BAL8	0,5470
167	JIW12	0,6386	191	WUN11	0,5272
168	WUN3	0,6361	192	GEG17	0,5243
169	GEG15	0,6357	193	DAG2	0,5181
170	MEJ5	0,6351	194	MAD1	0,5088
171	PIL3	0,6332	195	BAL5	0,4644
172	SAR4	0,6312	196	MEJ4	0,4569
173	DAG14	0,6185	197	SAR9	0,4406
174	DAG8	0,6163	198	WUN7	0,4336

Desain Kuesioner Penelitian

No.	Criteria	Sub Criteria	Komponen	No.	Uraian	Pengukuran
1.	Perencanaan	Perencanaan RPJMDes dan RKPDes	Proses	1	Apakah proses penyusunan perencanaan di desa Anda telah melalui proses musyawarah dusun, pra musyawarah desa, musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa?	1= Hanya musdus 2= Hanya musdes 3= Hanya musrenbangdes 4= Hanya musdes dan musrenbangdes 5= Semua dilaksanakan
				2	Kapan Perdes RPJMDes ditetapkan di desa Anda?	1= Lebih dari 4 bulan setelah pelantikan 2= 4 bulan setelah pelantikan 3= 3 bulan setelah pelantikan 4= 2 bulan setelah pelantikan 5= 1 bulan setelah pelantikan

No.	Criteria	Sub Criteria	Komponen	No.	Uraian	Pengukuran
				3	Kapan Perdes RKPDes 2020 ditetapkan di desa Anda?	1= Lebih dari desember 2019 2= Desember 2019 3=November 2019 4= Oktober 2019 5=September 2019
				4	Apakah penyusunan RPJMDes dan RKPDes dikerjakan menggunakan Sistem Aplikasi Perencanaan?	1= Tidak Pernah 2= Jarang 3= Kadang-kadang 4= Sering 5=Selalu
			Output	5	Apakah dari musyawarah dusun dihasilkan 5 dokumen sebagai berikut: Daftar hadir, Foto kegiatan, Rekap usulan dusun, Berita Acara Musdus, BA Pergantian Usulan (kondisional)?	1= Tanpa dokumen 2= Hanya daftar hadir 3= Ada daftar hadir dan foto 4= Ada daftar hadir, foto, rekap usulan dan BA Musdus 5= Lengkap 5 dokumen

No.	Criteria	Sub Criteria	Komponen	No.	Uraian	Pengukuran
				6	Apakah dari pra musyawarah desa dihasilkan 8 dokumen sebagai berikut: Daftar hadir, Foto kegiatan, SK Tim Penyusun RKP, SK Tim Verifikasi, Jadwal verifikasi, Rekomendasi Tim Verifikasi, BA Rekomendasi Tim Verifikasi, Desain RAB kegiatan?	1= Tanpa dokumen 2= Hanya daftar hadir 3= Ada daftar hadir, foto, SK Tim Penyusun RKP, SK Tim Verifikasi dan Jadwal verifikasi 4= Ada daftar hadir, foto, SK Tim Penyusun RKP, SK Tim Verifikasi, Jadwal verifikasi dan Rekomendasi Tim Verifikasi 5= Lengkap 8 dokumen
				7	Apakah dari musyawarah desa dihasilkan 8 dokumen sebagai berikut: Daftar hadir, Foto kegiatan, Dokumen Usulan, Hasil Perangkingan, Berita Acara Perangkingan, Berita Acara Musdes, Rancangan RKPDes, BA Estimasi?	1= Tanpa dokumen 2= Ada daftar hadir dan foto 3= Ada daftar hadir, foto, dokumen usulan dan hasil perangkingan 4= Ada daftar hadir, foto, dokumen usulan, hasil perangkingan, BA perangkingan, BA Musdes, Rancangan RKPDes

No.	Criteria	Sub Criteria	Komponen	No.	Uraian	Pengukuran
						5= Lengkap 8 dokumen
				8	Apakah dari musyawarah perencanaan pembangunan desa dihasilkan 4 dokumen sebagai berikut: Daftar hadir, Foto kegiatan, Berita Acara Musrenbangdes dan Perdes RKPDes?	1= Tanpa dokumen 2= Ada daftar hadir 3= Ada daftar hadir dan foto 4= Ada daftar hadir, foto dan BA musrenbangdes 5= Lengkap 4 dokumen
			Outcome	9	Sejak RPJMDes ditetapkan, berapa persen kegiatan yang telah terakomodir dalam RKPDes 2020?	1= Terakomodir kurang dari 30% 2= Terakomodir 30% - 50% 3= Terakomodir 51% - 70% 4= Terakomodir 71% - 90% 5= Terakomodir lebih dari 90%

No.	Criteria	Sub Criteria	Komponen	No.	Uraian	Pengukuran
				10	Apakah usulan masyarakat yang telah di akomodir dalam RKPDes 2020 dapat terealisasi sesuai rencana dan target?	1= Terealisasi kurang dari 30% 2= Terealisasi 30% - 50% 3= Terealisasi 51% - 70% 4= Terealisasi 71% - 90% 5= Terealisasi lebih dari 90%
		Perencanaan APBDes	Proses	11	Apakah proses penyusunan APBDes di desa Anda telah melalui proses musyawarah?	1= Tidak Pernah 2= Hanya diskusi internal pemerintah desa 3= Musyawarah pemerintah desa dengan BPD 4= Musyawarah pemerintah desa, BPD dan Kasun 5= Musyawarah pemerintah desa, BPD, Kasun, RT, lembaga desa dan tokoh masyarakat.

No.	Criteria	Sub Criteria	Komponen	No.	Uraian	Pengukuran
				12	Kapan Perdes APBDes 2020 ditetapkan di desa Anda?	1= Lebih dari maret 2020 2= Maret 2020 3= Februari 2020 4= Januari 2020 5= Desember 2019
			Output	13	Apakah dari musyawarah penyusunan APBDes dihasilkan 6 dokumen sebagai berikut: Daftar hadir, Foto kegiatan, Rancangan Perdes APBDes, Rancangan Perkades Penjabaran APBDes, Berita Acara Musyawarah, Berita Acara Evaluasi Tim Kecamatan?	1= Tanpa dokumen 2= Ada daftar hadir dan foto 3= Ada daftar hadir, foto dan RAPBDes 4=Ada daftar hadir, foto, RAPBDes dan Rancangan Penjabaran APBDes 5= Lengkap 6 dokumen

No.	Criteria	Sub Criteria	Komponen	No.	Uraian	Pengukuran
			Outcome	14	Apakah program dan kegiatan yang disusun di APBDes sesuai/linier dengan rencana di RKPDes? (Dihitung dari: Jumlah kegiatan yang linier dengan RKPDes*100% / Jumlah kegiatan di APBDes)	1= Sesuai kurang dari 70% 2= Sesuai 71% - 80% 3= Sesuai 81% - 90% 4= Sesuai 91% - 99% 5= Sesuai 100%
2.	Partisipasi	Partisipasi dan keaktifan BPD	Proses	15	Unsur apa saja yang mewakili Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Anda?	1= Unsur muda dan tua 2= Unsur laki-laki dan perempuan 3= Unsur tokoh masyarakat 4 = Unsur kewilayah 5= Unsur kewilayahan dan perempuan
				16	Berapa kali Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Anda menyelenggarakan musyawarah desa dalam setahun?	1= Tidak Pernah 2= 1-4 kali 3= 5-8 kali 4= 9-12 kali 5= lebih dari 12 kali

No.	Criteria	Sub Criteria	Komponen	No.	Uraian	Pengukuran
				17	Bagaimana partisipasi LKD (LPMD) dalam proses penyusunan perencanaan di desa anda?	1= Tidak pernah hadir 2= Hadir saat musrenbangdes 3= Hadir saat musdes 4= Hadir saat musdes dan musrenbangdes 5= Hadir mulai musdes hingga musrenbangdes
			Output	18	Berapa banyak produk hukum yang diterbitkan oleh Badan Permusyawaratan Desa selama setahun?	1= Tidak Ada 2= 1-3 produk hukum 3= 4-7 produk hukum 4= 8-10 produk hukum 5= lebih dari 10 produk hukum
				19	Apakah BPD membuat laporan kinerja semesteran setiap tahunnya?	1= Tidak Pernah 2= Jarang 3= Kadang-kadang 4= Sering 5=Selalu

No.	Criteria	Sub Criteria	Komponen	No.	Uraian	Pengukuran
			Outcome	20	Berapa besar aspirasi terkait kebutuhan/masalah yang dihadapi masyarakat yang tidak tersampaikan kepada Pemerintah Desa melalui Badan Permusyawaratan Desa?	1= Lebih dari 50% 2= 31%-50% 3= 10%-30% 4=1%-5% 5= Tidak Ada
		Partisipasi masyarakat dalam penyusunan regulasi di desa (misal: RPJMDes, RKPDes dan APBDes)	Proses	21	Apakah pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam kegiatan musyawarah yang diselenggarakan pemerintah desa?	1= Tidak Pernah 2= Jarang 3= Kadang-kadang 4= Sering 5=Selalu
				22	Apakah rancangan peraturan desa telah melalui tahap evaluasi oleh Tim Kecamatan?	1= Tidak Pernah 2= Jarang 3= Kadang-kadang 4= Sering 5=Selalu

No.	Criteria	Sub Criteria	Komponen	No.	Uraian	Pengukuran
			Output	23	Berapakah jumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi pada setiap musyawarah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa? (misal: musyawarah penyusunan RPJMDes, RKPDDes, APBDes)	1= kurang dari 5 orang 2= 5-10 orang 3= 11-15 orang 4= 16-20 orang 5= lebih dari 20 orang
			Outcome	24	Berapa besar aspirasi masyarakat terakomodir dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa?	1= 25% tersampaikan 2= 50% tersampaikan 3= 75% tersampaikan 4= 90% tersampaikan 5= lebih dari 90% tersampaikan
3.	Transparansi	Transparansi penyelenggaraan pemerintah desa	Proses	25	Apakah kepala Desa dipilih melalui proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) setiap 6 tahun sekali?	Ya/Tidak
				26	Apakah seleksi perangkat desa dilakukan melalui proses penyaringan dan penjurangan sesuai regulasi yang berlaku?	Ya/Tidak

No.	Criteria	Sub Criteria	Komponen	No.	Uraian	Pengukuran
			Output	27	Media apakah yang menjadi tempat publikasi pemerintah Desa terkait Susunan Organisasi, SOP Pelayanan dan peraturan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa?	1= Tidak Ada 2= Papan informasi kantor desa 3= Papan informasi dan banner/spanduk 4= Papan informasi, banner/spanduk dan website desa 5= Papan informasi, banner/spanduk, website desa dan media sosial (instagram, WA Group, facebook, dll)
			Outcome	28	Bagaimana masyarakat di desa dapat mengakses informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa melalui media informasi publik baik cetak maupun elektronik?	1= Sangat Sulit 2= Sulit 3= Cukup Mudah 4= Mudah 5= Sangat Mudah

No.	Criteria	Sub Criteria	Komponen	No.	Uraian	Pengukuran
		Transparansi pelaksanaan APBDes	Proses	29	Apakah penyaluran dana transfer (ADD, DD, Bagi Hasil Pajak Retribusi, BKK) ke rekening kas desa sesuai dengan waktu pentahapan?	1= Sesuai kurang dari 40% 2= Sesuai 41% - 60% 3= Sesuai 61% - 80% 4= Sesuai 81% - 90% 5= Sesuai lebih dari 90
				30	Berapa persentase penyetoran potongan pajak dari transaksi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam setahun?	1= terbayar kurang dari 50% 2= terbayar 50% - 70% 3= terbayar 71% - 80% 4= terbayar 80% - 90% 5= terbayar 91% - 100%
			Output	31	Apakah penatausahaan APBDes di desa Anda telah memuat 7 dokumen sebagai berikut : Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Anggaran Kas (RAK), Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu	1= Ada RKA 2= Ada RKA dan RAB 3= Ada RKA, RAB, RAK dan BKU 4= Ada RKA, RAB, RAK, BKU dan Buku Pembantu Bank 5= Lengkap 7 dokumen

No.	Criteria	Sub Criteria	Komponen	No.	Uraian	Pengukuran
					Bank, Buku Pembantu Pajak dan Buku Pembantu Kegiatan?	
				32	Apakah setiap realisasi kegiatan di desa Anda telah dilengkapi 4 dokumen sebagai berikut: Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Kwitansi, Nota/Faktur dan Bukti pembayaran pajak?	1= Tidak Ada 2= Ada SPP 3= Ada SPP dan kwitansi 4= Ada SPP, kwitansi dan nota/faktur 5= Lengkap 4 dokumen
				33	Apakah setiap selesai pelaksanaan kegiatan, Kasi/Kaur pelaksana membuat Laporan kegiatan kepada kepala desa?	1= Tidak Pernah 2= Jarang 3= Kadang-kadang 4= Sering 5=Selalu
				34	Laporan realisasi APBDes apa saja yang disampaikan oleh pemerintah	1= Tidak Ada 2= Laporan realisasi APBDes tahunan

No.	Criteria	Sub Criteria	Komponen	No.	Uraian	Pengukuran
					desa Anda kepada Bupati melalui camat?	3= Laporan realisasi APBDes semesteran 4= Laporan realisasi APBDes semesteran dan tahunan 5= Laporan realisasi APBDes triwulanan, semesteran dan tahunan
				35	Berapa jumlah pengaduan masyarakat kepada aparat penegak hukum terkait pengelolaan keuangan desa tahun 2020?	1= Lebih dari 3 kasus 2= 3 kasus 3= 2 kasus 4= 1 kasus 5= Tidak Pernah
			Outcome	36	Bagaimana cara masyarakat mendapatkan informasi tentang progress pelaksanaan/realisasi APBDes melalui media informasi publik baik cetak atau elektronik?	1= Sangat Sulit 2= Sulit 3=Cukup Mudah 4= Mudah 5= Sangat Mudah

No.	Criteria	Sub Criteria	Komponen	No.	Uraian	Pengukuran
4.	Akuntabilitas	Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Inspektorat)	Proses	37	Apakah realisasi pelaksanaan APBDes telah di audit tahunan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Inspektorat)?	1= Tidak Pernah 2= Jarang 3= Kadang-kadang 4= Sering 5=Selalu
			Output	38	Berapa jumlah kasus temuan hasil audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Inspektorat) pada tahun 2020 di desa Anda?	1= Lebih dari 3 kasus 2= 3 kasus 3= 2 kasus 4= 1 kasus 5= Tidak Ada
			Outcome	39	Berapa persentase Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Inspektorat) yang ditindaklanjuti dan dipenuhi dengan baik oleh desa Anda?	1= Tidak pernah ditindaklanjuti 2= 50% - 75% ditindaklanjuti 3= 76% - 85% ditindaklanjuti 4= 86% - 95% ditindaklanjuti 5= Selalu ditindaklanjuti 100%

No.	Criteria	Sub Criteria	Komponen	No.	Uraian	Pengukuran
		Akuntabilitas pelaksanaan APBDes	Proses	40	Apakah pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban dikerjakan menggunakan Siskeudes?	1= Tidak Pernah 2= Jarang 3= Kadang-kadang 4= Sering 5=Selalu
				41	Apakah realisasi pelaksanaan APBDes telah dipublikasikan kepada masyarakat melalui musyawarah desa maupun media informasi publik (cetak/elektronik)?	1= Tidak Pernah 2= Jarang 3= Kadang-kadang 4= Sering 5=Selalu
				42	Berapa persen PPKD (Perangkat Desa) yang belum memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan keuangan desa?	1= Lebih dari 50% PPKD 2= 31%-50% PPKD 3= 11%-30% PPKD 4=1%-10% PPKD 5= Tidak Ada
			Output	43	Kapan pemerintah desa membuat Laporan Pertanggungjawaban	1= lebih dari 5 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran

No.	Criteria	Sub Criteria	Komponen	No.	Uraian	Pengukuran
					Realisasi APBDes kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD?	2= 5 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran 3= 4 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran 4= 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran 5= 1-2 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran
				44	Media publikasi apa saja di desa Anda yang berguna sebagai pusat informasi pertanggungjawaban APBDes kepada masyarakat?	1= Tidak Ada 2= Papan informasi kantor desa 3= Papan informasi dan banner/spanduk 4= Papan informasi, banner/spanduk dan website desa 5= Papan informasi, banner/spanduk, website desa dan media sosial (instagram, WA Group, facebook, dll)

No.	Criteria	Sub Criteria	Komponen	No.	Uraian	Pengukuran
			Outcome	45	Berapa persen realisasi pelaksanaan APBDes dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan bupati melalui laporan dan media publikasi?	1= kurang dari 50% 2= 50% - 75% 3= 76% - 85% 4= 86% - 95% 5= 96% - 100%
				46	Bagaimana hasil rekonsiliasi akhir tahun antara pembukuan keuangan di Siskeudes dengan Rekening Kas di bank?	1= Tidak pernah dilakukan rekonsiliasi 2= Terjadi selisih lebih dari 50 juta 3= Terjadi selisih 25 juta-50 juta 4= Terjadi selisih kurang dari 25 juta 5= Sesuai tanpa ada selisih
				47	Bagaimana tingkat kepuasan BPD atas Laporan Pertanggungjawaban APBDes Tahun 2020 yang disampaikan oleh Pemerintah Desa?	1= Tidak Puas 2= Kurang Puas 3= Cukup Puas 4= Puas 5= Sangat Puas

No.	Criteria	Sub Criteria	Komponen	No.	Uraian	Pengukuran
		Inventarisasi, pengelolaan dan pelaporan aset desa	Proses	48	Berapa kali desa Anda melakukan inventarisasi aset desa pada 3 tahun terakhir (2018-2020)?	1= Tidak pernah 2= 1 kali 3= 2 kali 4= 3 kali 5= Lebih dari 3 kali
				49	Apakah dalam pengelolaan aset desa menggunakan sistem aplikasi? (misalnya SIPADES)	Ya/Tidak
			Output	50	Apakah setelah dilakukan inventarisasi aset desa selalu dituangkan dalam sebuah Laporan Aset Desa?	1= Tidak Pernah 2= Jarang 3= Kadang-kadang 4= Sering 5=Selalu
			Outcome	51	Bagaimana hasil rekonsiliasi akhir tahun antara Laporan Kekayaan Milik Desa/Aset Desa dengan keuangan desa?	1= Tidak pernah dilakukan rekonsiliasi 2= Terjadi selisih lebih dari 100 juta 3= Terjadi selisih 50 juta-100 juta

No.	Criteria	Sub Criteria	Komponen	No.	Uraian	Pengukuran
						4= Terjadi selisih kurang dari 50 juta 5= Sesuai tanpa ada selisih
5.	Efektifitas	Efektifitas penggunaan anggaran dalam APBDes.	Proses	52	Apakah anggaran kegiatan di APBDes 2020 dapat terlaksana sesuai dengan rencana kas yang ditetapkan?	1= Sesuai rencana kurang dari 30% 2= Sesuai rencana 30% - 50% 3= Sesuai rencana 51% - 75% 4= Sesuai rencana 76% - 90% 5= Sesuai rencana lebih dari 90%
			Output	53	Bagaimana prioritas alokasi penggunaan bidang Pembangunan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Bencana pada APBDes tahun 2020 di desa Anda?	1= kurang dari sama dengan 40% 2= 41-45% 3= 46-50% 4= 51-55% 5= > 55%
			Outcome	54	Berapa persentase penyerapan APBDes tahun 2020 di desa Anda?	1= Kurang dari 50% 2= 50% - 75% 3= 76% - 85% 4= 86% - 95% 5= Lebih dari 95%

No.	Criteria	Sub Criteria	Komponen	No.	Uraian	Pengukuran
6.	Pelayanan	Pelayanan administratif dan non administratif kepada masyarakat.	Proses	55	Bagaimana respon dan penyelesaian pemerintah desa atas keluhan pelayanan administratif maupun non administratif yang disampaikan masyarakat?	1= Tidak responsif dan adaptif 2= Kurang responsif dan adaptif 3= Cukup responsif dan adaptif 4= Responsif dan adaptif 5= Sangat responsif dan adaptif
				56	Berapa kali pemerintah desa melakukan survey kepuasan pelayanan kepada masyarakat sebagai evaluasi kinerja pemerintah desa?	1= Tidak Pernah 2= setahun sekali 3= setahun 2 kali 4= setahun 3 kali 5= setahun 4 kali
				57	Apakah pemerintah desa menggunakan Sistem Aplikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat? (misal: aplikasi kependudukan, aplikasi surat menyurat, dll)	1= Tidak Pernah 2= Jarang 3= Kadang-kadang 4= Sering 5=Selalu

No.	Criteria	Sub Criteria	Komponen	No.	Uraian	Pengukuran
				58	Apa saja sarana dan prasarana utama untuk pelayanan di kantor desa Anda?	1= Kursi, meja, lemari 2= Kursi, meja, lemari, komputer, mesin printer 3= Kursi, meja, lemari, komputer, mesin printer, internet, tv 4= Kursi, meja, lemari, komputer, mesin printer, internet, tv, telepon, ac 5= Kursi, meja, lemari, komputer, mesin printer, mesin fotokopi, internet, tv, telepon, ac
			Output	59	Berapa lama pelayanan administratif untuk setiap orang dapat diselesaikan oleh Pemerintah Desa?	1= Lebih dari 3 hari 2= 3 hari 3= 2 hari 4= 1 hari 5= Kurang dari 1 hari (kurang dari 24 jam)

No.	Criteria	Sub Criteria	Komponen	No.	Uraian	Pengukuran
			Outcome	60	Berapa besar persentase pelayanan pemerintah desa bisa mengcover seluruh masyarakat di desa Anda?	1= Kurang dari 50% 2= 50% - 75% 3= 76% - 85 4= 86% - 95% 5= Lebih dari 95%
				61	Bagaimana fasilitas dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat di desa Anda?	1= Terdapat poskesdes/polindes/posyandu yang dapat dijangkau lebih dari 30 menit tanpa ada tenaga kesehatan 2= Terdapat poskesdes/polindes/posyandu yang dapat dijangkau lebih dari 30 menit dengan tenaga kesehatan perawat saja 3= Terdapat poskesdes/polindes/posyandu yang dapat dijangkau dalam 30 menit dengan tenaga kesehatan bidan saja

No.	Criteria	Sub Criteria	Komponen	No.	Uraian	Pengukuran
						<p>4= Terdapat poskesdes/polindes/posyandu yang dapat dijangkau kurang dari 30 menit dengan tenaga kesehatan bidan dan perawat</p> <p>5= Terdapat poskesdes, polindes dan posyandu yang dapat dijangkau kurang dari 30 menit dengan tenaga kesehatan yang lengkap (dokter, bidan, perawat)</p>
				62	Bagaimana fasilitas pendidikan untuk masyarakat di desa Anda?	<p>1= Terdapat PAUD dan SD</p> <p>2= Terdapat PAUD, SD dan SMP</p> <p>3= Terdapat PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK</p> <p>4= Terdapat PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, Paket ABC dan taman bacaan/perpustakaan desa</p>

No.	Criteria	Sub Criteria	Komponen	No.	Uraian	Pengukuran
						5= Terdapat PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, Paket ABC, tempat keterampilan khusus dan taman bacaan/perpustakaan desa
				63	Bagaimana fasilitas air, listrik, sanitasi dan sarana komunikasi (jaringan telepon dan internet) di pemukiman desa Anda?	1= Fasilitas air, listrik, sanitasi dan sarana komunikasi sangat kurang 2= Fasilitas air, listrik, sanitasi dan sarana komunikasi kurang lancar 3= Fasilitas air, listrik, sanitasi dan sarana komunikasi cukup 4= Fasilitas air, listrik, sanitasi dan sarana komunikasi baik 5= Fasilitas air, listrik, sanitasi dan sarana komunikasi sangat baik dan lancar
7.	Perekonomian	Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan	Proses	64	Apakah pemerintah desa memprioritaskan pengalokasian anggaran untuk memperbaiki kondisi	1= Tidak Pernah 2= Jarang 3= Kadang-kadang

No.	Criteria	Sub Criteria	Komponen	No.	Uraian	Pengukuran
		perbaikan perekonomian masyarakat.			perekonomian masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat desa?	4= Sering 5=Selalu
				65	Apakah BUMDes memiliki struktur organisasi yang resmi dan telah berbadan hukum?	Ya/Tidak
				66	Bagaimana akses masyarakat ke lembaga ekonomi rakyat (Perbankan/BPR/Koperasi) untuk mendukung pemberdayaan ekonomi di desa Anda?	1= Sangat baik 2= Baik 3=Cukup 4= Kurang 5= Sangat kurang
				67	Bagaimana fasilitas pusat pelayanan perdagangan (pasar desa, warung, minimarket, kedai/depot) untuk masyarakat di desa Anda?	1= Sangat baik 2= Baik 3=Cukup 4= Kurang 5= Sangat kurang

No.	Criteria	Sub Criteria	Komponen	No.	Uraian	Pengukuran
			Output	68	Berapa rasio PADes terhadap total Pendapatan pada APBDes tahun 2020 di desa Anda?	1= Kurang dari 5% 2= 5% - 10% 3= 11 - 15% % 4= 16% - 20% 5= Lebih dari 20%
				69	Berapa persentase peningkatan PADes (di luar Tanah Kas Desa) tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya? (Dihitung dari: PADes tahun ini-PADes tahun lalu *100% / PADes tahun lalu)	1= Kurang dari 25% 2= 25% - 35% 3= 36% - 45% 4= 46% - 55% 5= Lebih dari 55%
				70	Berapa rata-rata bagi hasil kontribusi dari BUMDes kepada PADes selama 2 tahun terakhir (2019-2020)?	1= Tidak ada 2= 1 - 5 Juta 3= 6 - 10 Juta 4= 11 - 15 Juta 5= Lebih dari 15 Juta

No.	Criteria	Sub Criteria	Komponen	No.	Uraian	Pengukuran
				71	Berapa persentase Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan perekonomian masyarakat pada tahun 2020?	1= Kurang dari 5% 2= 5% - 10% 3= 11 - 15% % 4= 16% - 20% 5= Lebih dari 20%
			Outcome	72	Apakah perekonomian masyarakat di desa Anda sudah stabil dan dapat hidup mandiri secara finansial?	1= Kurang dari 50% sudah mandiri 2= 50% - 60% sudah mandiri 3= 61% - 70% sudah mandiri 4= 71% - 80% sudah mandiri 5= Lebih dari 80% sudah mandiri
				73	Berapa persentase penurunan kemiskinan pada tahun 2020 di desa Anda?	1= Kurang dari 0,5% 2= 0,5% - 1% 3= 1,1% - 2% 4= 2,1% - 3% 5= Lebih dari 3%

No.	Criteria	Sub Criteria	Komponen	No.	Uraian	Pengukuran
8.	Hubungan Birokrasi	Komunikasi dan koordinasi pemerintah desa dengan instansi di atasnya.	Proses	74	Apakah pemerintah desa berkoordinasi dengan kecamatan dan Dinas di tingkat kabupaten dalam menjalankan tugas dan fungsinya?	1= Tidak Pernah 2= Jarang 3= Kadang-kadang 4= Sering 5=Selalu
			Output	75	Bagaimana tingkat kehadiran Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rapat koordinasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa di tingkat kecamatan dan kabupaten dalam setahun?	1= Tidak Pernah hadir 2= Jarang hadir 3= Kadang-kadang hadir 4= Sering hadir 5=Selalu hadir
			Outcome	76	Berapa besar implementasi peraturan di desa yang tidak sejalan dengan peraturan di tingkat kabupaten?	1= Lebih dari 50% 2= 31%-50% 3= 10%-30% 4=1%-5% 5= Tidak Ada

No.	Criteria	Sub Criteria	Komponen	No.	Uraian	Pengukuran
9.	Keamanan Masyarakat	Keamanan masyarakat dari aspek sosial dan lingkungan	Proses	77	Apakah pemerintah desa berkoordinasi dengan aparat penegak hukum tingkat kecamatan maupun kabupaten untuk menjaga keamanan di desa?	1= Tidak Pernah 2= Jarang 3= Kadang-kadang 4= Sering 5=Selalu
				78	Apakah pemerintah desa memprioritaskan keamanan dan perlindungan khususnya untuk kelompok anak-anak, perempuan, lansia, orang miskin dan rentan sosial (ODGJ)?	1= Tidak Pernah 2= Jarang 3= Kadang-kadang 4= Sering 5=Selalu
			Output	79	Berapa banyak kegiatan dalam tahun 2020 untuk menjaga keamanan di lingkungan desa?	1= Kurang dari 2 kegiatan 2= 2-3 kegiatan 3= 4-5 kegiatan 4= 6-7 kegiatan 5= Lebih dari 7 kegiatan

No.	Criteria	Sub Criteria	Komponen	No.	Uraian	Pengukuran
				80	Berapa rata-rata persentase anggaran setiap tahunnya yang dialokasikan untuk program/kegiatan perlindungan dan fasilitasi terhadap kelompok anak-anak, perempuan, lansia, orang miskin dan rentan sosial/disabilitas?	1= Kurang dari 3% 2= 3% - 5% 3= 6% - 8% 4= 9% - 10% 5= Lebih dari 10%
			Outcome	81	Berapa kasus kejahatan/kriminal yang mengakibatkan ketidakamanan di lingkungan desa Anda pada tahun 2020?	1= Lebih dari 10 kasus 2= 7-10 kasus 3= 4-6 kasus 4= 0-3 kasus 5= Tidak Ada
				82	Apakah terdapat program/kegiatan untuk penyandang kesejahteraan sosial (anak jalanan, pengemis, PSK) di desa Anda?	1= Tidak Pernah 2= Jarang 3= Kadang-kadang 4= Sering 5= Selalu

No.	Criteria	Sub Criteria	Komponen	No.	Uraian	Pengukuran
				83	Bagaimana upaya tanggap bencana terhadap potensi bencana alam di desa Anda? (jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana)	1= Sangat baik 2= Baik 3= Cukup 4= Kurang 5= Sangat kurang

PENULIS



Penulis bernama lengkap Wridhasari Hayuningtyas lahir di Madiun pada tanggal 21 Juni 1991. Penulis merupakan salah satu Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun sebagai Analis Data dan Informasi pada Bidang Bina Pemerintahan Desa. Penulis menempuh jenjang S1 pada jurusan Statistika Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Penulis melanjutkan jenjang S2 Telematika di ITS dengan mengikuti program Pengelola TIK Pemerintahan (PETIK) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada tahun 2020. Jika ada informasi yang perlu didiskusikan terkait dengan tesis ini, penulis dapat dihubungi melalui email yuyun165@yahoo.com.